

**KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO YANG MELATARBELAKANGI
KONFLIK POLITIK ANTARA PARTAI ISLAM DENGAN KOMUNIS
TAHUN 1959-1965**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Bahasa
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Humaniora (S. Hum)



Disusun Oleh:

Uswatun Hasanah
NIM 196131044

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Uswatun Hasanah
NIM : 196131044

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Adab dan Bahasa
UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaiukum Wr. Wb

Setelah membaca dan memberi arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Sdri :

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 196131044

Judul : "Kebijakan Presiden Soekarno Yang Melatarbelakangi Konflik Politik Antara Partai Islam Dengan Komunis Tahun 1959-1965"

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqosyah skripsi guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Dengan demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 18 September 2023
Pembimbing,



Martina Safitry, S.S., M.A.
NIP. 198603082018012001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 196131044
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 18 Mei 2000
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Adab dan Bahasa
Judul Skripsi : “Kebijakan Presiden Soekarno Yang Melatarbelakangi
Konflik Politik Antara Partai Islam Dengan Komunis
Tahun 1959-1965”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi saya ini adalah plagiat, maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini penulis buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Surakarta, 27 September 2023


Yang menyatakan



Uswatun Hasanah
NIM. 196131044

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul “Kebijakan Presiden Soekarno Yang Melatarbelakangi Konflik Politik Antara Partai Islam Dengan Komunis Tahun 1959-1965” yang disusun oleh **Uswatun Hasanah** telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta pada hari, tanggal dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Penguji Utama : Dr. H. Mohammad Mahbub, S.Ag., M.Si. (.....) 
NIP. 197004101997031004

Penguji I Merangkap : Aan Ratmanto, M.A. (.....) 
Ketua Sidang NIP. 198306252018101010

Penguji II Merangkap : Martina Safirty, S.S., M.A. (.....) 
Sekretaris Sidang NIP. 198603082018012001

Surakarta, 11 November 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Bahasa



Prof. Dr. H. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197108011999031003

HALAMAN MOTTO

“Revolusi kami, seperti juga samudera luas, adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu aku harus tahu sekarang bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.”

(Ir. Soekarno)

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 26)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk:

Almamaterku Fakultas Adab dan Bahasa;

UIN Raden Mas Said Surakarta;

Ayah, Ibu, dan seluruh keluargaku;

Semua orang-orang yang telah membantuku selama ini.

ABSTRAK

Kebijakan Presiden Soekarno Yang Melatarbelakangi Konflik Politik Antara Partai Islam Dengan Komunis Tahun 1959-1965

Sistem Demokrasi Terpimpin merupakan suatu konsep pemerintahan yang diberlakukan oleh Soekarno dengan berdasar pada dua doktrin utama yaitu Manipol Usdek dan Nasakom. Kedua doktrin tersebut kemudian menjadi suatu dasar atau kebijakan dalam Pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Namun kedua kebijakan tersebut yang melatarbelakangi konflik politik antara partai-partai Islam dan PKI. Konflik politik yang terjadi diperkeruh dengan adanya media pers yang menyebarkan propaganda-propaganda politik yang saling menjatuhkan.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah Indonesia kontemporer dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam adalah Teori Sistem Politik dan Teori Konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah meliputi, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan kepustakaan serta sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga jenis konflik politik yang terjadi antara partai-partai Islam dengan PKI. Pertama, konflik politik yang bersifat konfrontatif yaitu yang terjadi antara Masyumi beserta tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam Liga Demokrasi secara terang tidak mau menerima PKI dalam pemerintahan. Kedua, NU, PSII, dan Perti yang menerima PKI dalam pemerintahan namun dengan tujuan untuk menjadi penyeimbang kekuatan politik PKI dalam pemerintahan. Ketiga, konflik propaganda politik yang saling menjatuhkan satu sama lain melalui media pers.

Kata Kunci : *Demokrasi Terpimpin, Kebijakan, Manipol Usdek, Nasakom, Konflik Politik.*

ABSTRACT

Menyimpan Bara Dalam Sekam : Kebijakan Soekarno Dalam Konflik Politik Partai Islam dan Komunis Pada Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

The Guided Democracy System is a government concept implemented by Soekarno based on two main doctrines, namely Manipol Usdek and Nasakom. These two doctrines then became a basis or policy in the Guided Democratic Government. However, these two policies were the background to the political conflict between Islamic parties and the PKI. The political conflict that occurred was made worse by the presence of the press media which spread political propaganda that undermined each other.

This research is research into contemporary Indonesian history using a public policy approach. The theories used are Political Systems Theory and Conflict Theory. The research method used is the historical method including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data collection techniques were carried out using documentation and literature and the nature of this research was descriptive-analytical.

The results of this research found that there were three types of political conflict that occurred between Islamic parties and the PKI. First, the confrontational political conflict that occurred between Masyumi and political figures who were members of the Democratic League clearly did not want to accept the PKI in government. Second, NU, PSII, and Perti accepted the PKI in government but with the aim of balancing the PKI's political power in government. Third, the conflict between political propaganda which brings down each other through the press.

Keywords: *Guided Democracy, Policy, Manipol Usdek, Nasakom, Political Conflict.*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW, manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Setelah gagal meneliti dua tema yang berbeda dan banyak *struggle* untuk menyelesaikan tugas akhir yang melewati proses cukup panjang akhirnya penulis memilih tema terakhir dengan meneliti mengenai kebijakan Soekarno terhadap konflik politik partai Islam dan Komunis dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini. Kenyataannya, proses penulisan skripsi ini tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, jika skripsi ini akhirnya bisa dikatakan selesai, hal tersebut bukan semata-mata karena usaha penulis, melainkan atas bantuan dari berbagai pihak.

Selesainya penelitian ini, penulis berterima kasih setinggi-tingginya kepada Ibu Martina Safitry, S.S., M.A., selaku koordinator prodi serta dosen pembimbing skripsi yang selalu membantu penulis di tengah kesibukannya yang cukup tinggi. Beliau selalu menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberi arahan serta petunjuk kepada penulis hingga proses penelitian selesai. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof. Dr. H. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta, Bapak Latif Kusairi, M.A., selaku dosen pembimbing akademik, serta seluruh dosen di program studi Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan semangat kepada penulis.

Secara pribadi, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada orang tua, Bapak Suwarno dan Ibu Sumitri atas semua doa-doa, pengorbanan,

dukungan moral dan material yang begitu besar kepada penulis. Hanya doa yang tulus semoga mereka berdua selalu dalam lindungan dan kasih Allah swt. Terima kasih juga kepada teman setiaku Dwi Raharjo yang telah banyak membantu dan menemani di kala senang dan susah selama empat tahun di UIN Raden Mas Said Surakarta ini. Kepada keponakan kembar ku Aisyah dan Fatimah serta Maisun yang telah menjadi teman di rumah serta memberi semangat kepada penulis dalam hal apapun, terima kasih sedalam-dalamnya.

Terima kasih untuk *bestie* ku : Muslikhah Nur Afifah dan Nanga Sri Hartini yang selalu menemani dan mendukung satu sama lain selama perkuliahan. Kepada teman-temanku kelas SPI B angkatan 2019 : Ilan, Liya, Ifah, Lisa, Indah, Laila, Shofi, Fatimah, Janah, Alfina, Winda, Wulan, Resti, Arya, Aqil, Aldiano, Iqbal, Hanif, Dzakwan, Rifa'i, Munji, Dida, Aslambik, Zuhdan, Udin, Faruq, terima kasih sedalam-dalamnya telah menemani nugas, dolan, nongkrong serta menghiasi keseharian dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu perlu saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya. Penulis berharap hasil skripsi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi khazanah ilmu Sejarah Islam.

Surakarta, 23 Agustus 2023.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Landasan Teori	13
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : LATAR BELAKANG DEMOKRASI TERPIMPIN	24
A. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Demokrasi Terpimpin	24
B. Konsepsi Demokrasi Terpimpin.....	28
BAB III : KONDISI POLITIK PEMERINTAHAN DEMOKRASI TERPIMPIN SERTA KONFLIK POLITIK DI DALAMNYA.....	31
A. Kebijakan Presiden Soekarno Dalam Pemerintahan Demokrasi Terpimpin	31
1. Nasakom.....	31
2. Manifesto Politik Indonesia USDEK	37
B. Pandangan Partai Islam dan Partai Komunis Terhadap Demokrasi Terpimpin.....	41
BAB IV : KONFLIK POLITIK PARTAI-PARTAI ISLAM DENGAN PKI TAHUN 1959-1965	48
A. Konflik Partai Masyumi Dengan Partai Komunis.....	48
B. Konflik Dalam Parlemen Antara NU dengan PKI	50
1. Dewan Pertimbangan Agung Sementara.....	52
2. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.....	54
C. Propaganda Politik Dalam Pers	55
1. Surat Kabar Harian Rakyat dan Bintang Timur	56
2. Surat Kabar Obor Rakjat	61
3. Surat Kabar Duta Masyarakat	65
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presiden Soekarno membacakan Dekrit 5 Juli 1959	27
Gambar 1.2 Cover buku tentang Manifesto Politik Indonesia yang menjadi doktrin utama Demokrasi Terpimpin.....	34
Gambar 1.3 Cover buku doktrinasi ajaran Nasakom Soekarno.....	40
Gambar 2.1 Potongan Surat Kabar Harian Rakjat 30 Mei 1964.....	57
Gambar 2.2 Potongan Surat Kabar Harian Rakjat 30 Mei 1964.....	58
Gambar 2.3 Potongan gambar Surat Kabar Bintang Timur Terbitan 15 Mei 1963.....	59
Gambar 2.4 Potongan gambar Surat Kabar Bintang Timur 6 Juni 1963.....	60
Gambar 2.5 Penggalan Surat Kabar Obor Rakjat “DPR-GR bukan tempat perjuangan Islam”.....	61
Gambar 2.6 Penggalan Surat Kabar Obor Rakjat“IPKI meminta supaya : PKI DIKUBURKAN SADJA. PKI serdadu gadjian negara Asing”.....	62
Gambar 2.7 Potongan Surat Kabar Obor Rakjat “Liga Demokrasi, suatu manifestasi jg spontaan! Sumatera Selatan bukan Kominis”.....	63
Gambar 2.8 Tajuk Berita Tentang Pers dan Manipol dalam Surat Kabar Obor Rakjat terbitan 30 Desember 1960.....	64
Gambar 2.9 Potongan Gambar Surat Kabar Duta Masyarakat 2 Juli 1963.....	66
Gambar 3.1 Potongan Gambar Surat Kabar Duta Masyarakat 17 Maret 1965.....	67
Gambar 3.2 Potongan Gambar Surat Kabar Duta Masyarakat 2 Juni 1965.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.....	35
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. ANRI, Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi.....	78
Lampiran 2. Koran Perdamaian, “Kembali Ke UUD 45 Merupakan Pukulan Telak Bagi Kaum Pemberontak”, 14 Agustus 1959.....	79
Lampiran 3. Obor Rakjat, “Liga Demokrasi Terbentuk”, 3 Mei 1960.....	79
Lampiran 4. Obor Rakjat, “Djika Parlemen dpt. Diganti dg. DPR-GR Bukam tak Mungkin DPR-2 Tk. I dan Tk. II akan diganti dengan “orang” DPR-GR Djuga”, 10 Mei 1960.....	80
Lampiran 5. Obor Rakjat, “Liga Demokrasi Tambah Barisan : PSII-Abikusno Masuk djadi Anggota”, 12 Mei 1960.....	80
Lampiran 6. Obor Rakjat, “Bohong Besar – Liga Demokrasi Dikatakan Anti Presiden Soekarno”, 16 Mei 1960.....	81
Lampiran 7. Obor Rakjat, “Liga Demokrasi, suatu Manifesto jang Spontaan! : Sumatera Selatan Bukan Kominis”, 17 Mei 1960.....	81
Lampiran 8. Obor Rakjat, “Untuk mengatasi amanat penderitaan rakjat perlu demokrasi : Keterangan Pers Djurubtjara Liga-Demokrasi”, 1 Juni 1960.....	82
Lampiran 9. Obor Rakjat, “DPR-GR bukan tempat perdjoangan Islam”, 4 Juni 1960.....	82
Lampiran 10. Obor Rakjat, “TANPA STEM-STEMAN : Demokrasi Harus dimolifisir menurut keadaan”, 28 Juni 1960.....	83
Lampiran 11. Obor Rakjat, “Larangan Kegiatan PKI/Organisasi-Organisasinja Masih Berlaku”, 3 Desember 1960.....	83
Lampiran 12. Harian Rakjat, “Luaskan Aksi Sefihak : Untuk Mengganjang Setan ² Desa dan memenangkan Manipol”, 30 Mei 1964.....	84
Lampiran 13. Harian Tempo, “Pendjelasan D.D. Petani Djateng Sekitar persoalan tanah di Klaten”. 2 Juni 1964.....	84
Lampiran 14. Kedaulatan Rakjay “Letjen A. Yani : Tiada Pilihan Lain Selain Menjalankan Dwikora”	84

Lampiran 15 Kedaulatan Rakjat “Perkara Kasman Singodimedjo : Saksi Memberatkan Terdakwa.....	85
Lampiran 16 Obor Rakjat “IPKI meminta Supaja : PKI Dikuburkan Sadja.....	85
Lampiran 17 Bintang Timur “Pandangan Rasialis Tak Pernah Benar.....	86
Lampiran 18 Bintang Timur “Kaum Kontra Revolusi Meniup ² Pertentangan.....	86
Lampiran 19 Duta Masyarakat “Djadilah Wakil Revolusi Indonesia jang Bernafaskan Keagamaan itu!”	87
Lampiran 20 Duta Masyarakat ““Setiap Perongrongan Thd. Segolongan Ummat Islam Berarti Perongrongan Terhadap Ummat Islam Seluruhnja.....	87
Lampiran 21 Duta Masyarakat “Menteri Agama : Jang Sedang Kita Galang adalah Nasakom”	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah menyelesaikan pendidikan di THS Soekarno semakin tertarik kepada dunia pergerakan politik dan kemudian pada tahun 1927 Soekarno bersama dengan Tjipto Mangunkoesoemo, Mr. Budhyarto Martoatmojo, Iskak Tjokroadisoerjo, dan Soenarjo membuat sebuah partai politik seperti yang dilakukan oleh Tjokroaminoto dengan Sjarikat Islam dengan nama Partai Nasional Indonesia (PNI)¹. Soekarno sebagai ketua umum menetapkan asas-asas PNI yaitu Ketuhanan, Sosio Nasionalisme, dan Sosio Demokrasi atau yang disebut dengan Marhaenisme². Marhaenisme merupakan ideologi yang tercipta oleh Soekarno yang saat itu dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Kolonialisme Belanda.

Soekarno tampil sebagai pemimpin yang memiliki keinginan yang teguh akan persatuan dan kesatuan yang membuat PNI memperoleh simpati dari masyarakat luar dan dalam Pulau Jawa. PNI tampil dengan propaganda-propaganda perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda dan hal tersebut berhasil mendapatkan simpati dari masyarakat sehingga berbondong-bondong menjadi simpatisan PNI. Pergerakan Soekarno dalam politik memperoleh hambatan dari pemerintah Hindia-Belanda, Soekarno dianggap sebagai

¹ Cindy Adams, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), hlm. 40. E-book <https://luk.staff.ugm.ac.id/CindyAdams-BungKarnoPenyambungLidahRakyatIndonesia.pdf>, diunduh pada 12 Mei 2023.

² *Ibid*, hlm. 44.

ancaman bagi eksistensi penjajahan Imperialisme Belanda yang membuatnya diburu dan diasingkan berulang-ulang kali. Soekarno dengan ideologi yang ia pegang teguh berhasil membawanya memperoleh posisi sebagai pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan hingga puncaknya menjadi Proklamator Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sepak terjang Soekarno dalam politik pada masa kolonial melahirkan sosok Soekarno yang patriotik, cinta tanah air dan penuh ambisi³. Soekarno kemudian terus memimpin perjuangan meraih kemerdekaan sampai dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Karir dan perjuangan politik Soekarno terus berlanjut, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditetapkan menjadi 'status quo' oleh Jepang dan kemudian menyebabkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda. Pada perjanjian Linggarjati (November 1946-Maret 1947) Soekarno meminta kepada Belanda untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra. Sementara dari pihak Belanda menuntut agar Republik Indonesia tergabung dalam negara persemakmuran dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Hasil dari perjanjian Linggarjati yang diwakili oleh Soekarno dan Mohammad Hatta tersebut dikritisi salah satunya oleh Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menganggap lemahnya pemerintahan Republik Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara⁴.

Mayoritas masyarakat juga turut menentang RIS sebab dianggap sebagai warisan dari Kolonialisme, namun Soekarno menjadikan RIS sebagai

³ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta : Pandji Masjarakat, 1960), hlm. 20.

⁴ Badri Yatim, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*, (Jakarta : Inti Aksara, 1985), hlm. 56.

taktik jangka pendek untuk menghindari konflik bersenjata dengan Belanda yang ketika itu memiliki kekuatan militer jauh lebih unggul daripada Republik Indonesia. Soekarno mengusulkan gagasan agar bentuk negara diputuskan sendiri oleh rakyat dan bukan oleh bekas kekuasaan kolonial melainkan dengan konstitusi terpilih⁵. Atas adanya gagasan tersebut seluruh negara persemakmuran kecuali Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur membubarkan diri dan memutuskan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Dengan adanya *Mosi Integral* yang dikemukakan oleh Mohammad Natsir (tokoh Partai Masyumi) semakin membukakan jalan untuk mewujudkan negara kesatuan. Hingga pada tanggal 19 Mei 1950 diumumkan kesepakatan bahwasanya semua pihak yang tergabung dalam negara persemakmuran telah sepakat untuk bersama-sama membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶. Kemudian pada 17 Agustus 1950 pembubaran Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

Berakhirnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat mengawali masa pencarian konstitusi negara. Setelah pembubaran RIS pemerintah kemudian menerbitkan Undang-undang No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Negara Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Konstitusi ini dilabeli ‘sementara’ sebab menantikan hasil Pemilihan Umum yang baru berhasil dilaksanakan pada 1955. Pemilu 1955 menghasilkan 4 (empat) besar partai yang secara berutan

⁵ Herbert Feith, 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, ..., hlm. 108.

⁶ *Ibid*, hlm. 112.

dimenangkan oleh PNI (57 kursi DPR), Masyumi (57 kursi DPR), NU (45 kursi DPR), dan PKI (39 kursi DPR) dengan total memperebutkan 260 kursi DPR⁷. Dari pemilu 1955 tersebut berhasil mendirikan Konstituante yang berdasar hukum UUDS Pasal 135 Tahun 1950 dengan tugas untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara⁸. Era di mana Republik Indonesia menggunakan UUDS 1950 inilah yang dinamakan sebagai era Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parleментар.

Pada Juli 1959 Konstituante dibubarkan oleh Soekarno dan menjadi simbol berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia⁹. Konstituante dianggap telah gagal dalam pembuatan undang-undang yang kemudian hanya menjadi wajah ajang perdebatan panjang antar partai saja. Sebulan setelah pembubaran sistem demokrasi liberal Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin dalam pidato pada peringatan HUT Indonesia yang diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”¹⁰. Soekarno hendak membawa Indonesia ke arah persatuan yang sebenarnya yang menurutnya tercermin ke dalam bentuk manifesto politik dengan dasar UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Bangsa¹¹. Soekarno menciptakan sistem politik yang menempatkan ia sebagai puncak

⁷ *Ibid*, hlm. 276.

⁸ Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia No. 7 Pasal 135 Tahun 1950, Lembaran Negara Nomor 1950-56. Diunduh pada, <https://peraturan.bpk.id/Home/Details/38102/uu-no-7-tahun-1950>

⁹ Sudarwanto Pujosantoso, *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*, (Pontianak : Derwati Press, 2018), hlm. 53.

¹⁰ Arin Kusumaningrum, *Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966*, (Jakarta : Pustaka Abadi, 2019), hlm. 45.

¹¹ *Ibid*.

dalam pemerintahan bertujuan untuk membenahi persoalan-persoalan yang ada tanpa campur tangan dari pihak lain untuk mengurangi perdebatan yang panjang¹². Oleh karena itu munculah perspektif jika Soekarno hendak menjalankan pemerintahan yang otoriter sehingga menimbulkan penolakan dari beberapa partai.

Dalam pemerintahan sebelumnya kursi parlemen dimenangkan oleh PNI, Masyumi, dan NU sementara PKI hanya menempati posisi ke-4 dan kalah dari dua partai Islam yaitu Masyumi dan NU. Soekarno kemudian memberhentikan tugas DPR dan pada Maret 1960 membentuk dewan baru dengan nama DPR-GR (gotong royong) kemudian juga merubah pula sistem pemilihan yang sebelumnya berdasar pertimbangan kekuatan suara diubah memprioritaskan partai-partai yang mendukung pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang diantaranya adalah yaitu partai PNI, NU, PKI, Partai Kristen-Katolik, dan Golongan Karya atau Militer yang semuanya ditentukan berdasar Pepres No. 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah¹³. KH. Wahab Chasbullah ketua umum NU menolak kebijakan Soekarno yang hendak merubah susunan DPR namun, penolakan tersebut ditarik kembali setelah jumlah kursi untuk NU ditambah¹⁴.

Beragam konflik dalam parlemen antara Islam dengan Komunis kemudian semakin menguat terlebih dengan kedekatan Soekarno dengan PKI

¹² *Ibid.*, hlm. 54.

¹³ Arin Kusumaningrum, 2019, *Masa Demokrasi Terpimpin*,..., hlm. 12.

¹⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin : Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang", *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 1 2020, hlm. 34.

dan pembubaran Partai Masyumi dan PSI yang terang kontra dengan pemerintahan Demokrasi Terpimpin Soekarno. Tak hanya itu partai NU dan PSII yang kelihatannya mendukung Demokrasi Terpimpin ternyata juga menampakkan respon penolakan sebab dominasi PKI dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Media Pers antara kedua belah pihak Islam dan Komunis-pun memperkeruh konflik yang terjadi dengan propaganda-proganda yang menunjukkan pro dan kontra terhadap pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Berdasar latar belakang di atas sekilas dijabarkan tentang kebijakan politik Soekarno yang memperoleh penolakan dari partai-partai Islam dan memicu konflik antara Islam dengan Komunis dalam pemerintahan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang sikap politik Soekarno terhadap konflik yang terjadi dalam pemerintahan demokrasi terpimpin dengan penelitian berjudul. “Kebijakan Presiden Soekarno Yang Melatarbelakangi Konflik Politik Antara Partai Islam Dengan Komunis Tahun 1959-1965”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka untuk lebih memfokuskan penelitian tersebut perlu adanya batasan masalah agar penelitian ini tidak terjadi pelebaran pembahasan. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan Soekarno dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara partai Islam dan partai Komunis dalam pemerintahan demokrasi terpimpin. Konsep

demokrasi terpimpin merupakan solusi yang ditawarkan Soekarno untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan pada demokrasi liberal. Namun, pada praktiknya konsep demokrasi terpimpin tak berjalan dengan demokratis disebabkan adanya salah pihak saja yang diuntungkan yaitu PKI dan pada akhirnya melalui PKI itu pula pemerintahan Soekarno berakhir.

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini maka diperlukan rumusan masalah yang akan diwakili melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, :

1. Bagaimana latar belakang Pemerintahan Demokrasi Teripimpin?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno menimbulkan konflik politik antara partai-partai Islam dan PKI?
3. Bagaimana Konflik yang terjadi antara partai-partai Islam dengan PKI baik dalam Pemerintahan ataupun media Pers?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup pembatasan secara spasial (tempat) dan temporal (waktu). Ruang lingkup bertujuan agar tidak terjadi pelebaran dalam pembahasan. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah wilayah politik yang berada dalam kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno. Kekuasaan pemerintah atas wilayah politik tersebut meliputi seluruh lembaga-lembaga negara atau masyarakat yang memiliki fungsi dan tujuan politik. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Kabinet Menteri, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong, Front Nasional, dan Liga Demokrasi. Kemudian untuk

menambah visual konflik politik yang terjadi pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin penelitian ini sedikit menambahkan media Pers dalam bentuk Surat Kabar yang meliputi, : Harian Rakjat, Bintang Timur, Obor Rakjat, dan Duta Masyarakat.

Sedangkan ruang lingkup temporal awal dalam penelitian ini adalah ditandai dengan diumumkannya Keppres No. 150 Tahun 1959 pada Dekrit 5 Juli 1959 kemudian di akhiri dengan peristiwa Gerakan 30 September pada 30 September 1965. Perbedaan kepentingan dan pandangan terhadap kebijakan baru yang lahir setelah adanya Dekrit Presiden menimbulkan gejolak konflik antara pihak-pihak yang dalam penelitian dikhususkan untuk membahas antara Partai-partai Islam dengan Partai Komunis Indonesia. Kemudian pasca peristiwa G30S kekuatan politik PKI berangsur-angsur melemah dan yang tersisa hanyalah kelompok-kelompok simpatisan kecil di daerah-daerah. Dengan demikian sudah tidak terdapat konflik politik antara pihak Islam dan Komunis dalam pemerintahan.

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, oleh karena itu tujuan dari penelitian adalah memperoleh jawaban dari setiap pertanyaan dalam rumusan permasalahan yang penulis paparkan dalam rumusan masalah di atas. Oleh karena itu tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana latar belakang sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, kemudian untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menimbulkan konflik politik antara partai-partai Islam

dengan PKI, dan terakhir untuk mengetahui bagaimana konflik politik yang terjadi dalam pemerintahan dan media pers antara partai-partai Islam dengan PKI.

E. Manfaat Penelitian

Suatu karya tulis diciptakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapaun secara teoritis tujuan dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang kebijakan-kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin dan konflik-konflik politik yang terjadi antara partai-partai Islam dengan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih bagi pengetahuan dalam program studi Sejarah Peradaban Islam terutama pada bidang sejarah Islam dalam dinamika politik di Indonesia, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berfokus pada kajian tentang pemerintahan demokrasi terpimpin ataupun dinamika partai-partai politik pada masa demokrasi terpimpin.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu usaha untuk memperoleh data yang sudah ada. Data merupakan salah satu hal yang terpenting dalam ilmu pengetahuan untuk menyimpulkan fakta-fakta dan gejala-gejala yang sudah terjadi¹⁵. Penelitian tentang kebijakan Soekarno pasca kemerdekaan dan serangkaian masalah yang terkait hal tersebut bukanlah penelitian yang awam dilakukan.

¹⁵ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 25.

Penelitian serupa telah dituliskan dalam buku, maupun skripsi yang meneliti tentang hal tersebut. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti beserta perbedaannya, :

Tinjauan pustaka pertama dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul *Sukarno dan Islam : Dialog Pemikiran Modernisme Islam di Indonesia* karya M. Ridwan Lubis¹⁶. Pokok bahasan buku ini adalah tentang kedudukan Islam dalam pemikiran Soekarno yang menggambarkan bagaimana Soekarno menggabungkan politik dengan Islam atau tentang unsur pembaruan Islam ala Soekarno. Buku ini membantu penelitian untuk mengetahui arah politik Soekarno dalam pembaruan politik di Indonesia yang memberikan kontribusi untuk setiap kebijakan Soekarno dalam membangun konsep demokrasi. Adapun kekurangan buku ini adalah terlalu memframing kepribadian Soekarno melalui opini pribadi penulis dan tidak membahas permasalahan politik yang muncul pada pemerintahan Soekarno secara jelas. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang sistem Demokrasi Terpimpin berikut konflik-konflik politik dan kebijakan-kebijakan yang terkait konflik tersebut.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah buku berjudul *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)* buku ini ditulis oleh Sudarwanto Pujosantoso¹⁷. Buku ini membahas mengenai sejarah, alasan, penerapan sistem pemerintahan demokrasi liberal dan terpimpin, kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal dan terpimpin, serta menyebutkan tentang

¹⁶ M. Ridwan Lubis, *Sukarno dan Islam : Dialog Pemikiran Modernisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : UMY Press, 2020).

¹⁷ Sudarwanto Pujosantoso, *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*, (Pontianak : Derwati Press, 2018).

peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Buku ini membantu peneliti untuk memahami bagaimana sejarah sistem demokrasi terpimpin dan memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa politik di dalamnya. Adapun kekurangan buku ini sekedar mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi beserta dengan hubungan sebab akibat yang tercipta di antara konsep demokrasi liberal dengan konsep demokrasi terpimpin. Oleh karena itu sebagai pembeda dan untuk melengkapi pembahasan tersebut penelitian ini akan membahas membahas mengenai konflik antar partai Islam dengan partai Komunis yang terjadi pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin dan kebijakan Soekarno yang mempengaruhinya.

Tinjauan pustaka yang ketiga adalah disertasi berjudul “Pemikiran Transformatif Ir Soekarno dalam Politik Islam”, yang ditulis oleh Anwar Sanusi¹⁸. Disertasi ini menganalisis pemikiran Soekarno dengan pendekatan psikologi dengan sampel penelitiannya adalah NASAKOM sebagai produk pemikiran transformatif Soekarno. Disertasi ini membahas tentang bagaimana proses pemikiran Soekarno dalam pembaruan ideologi pemerintahan pasca demokrasi liberal yang dianggapnya sebagai kegagalan dan tidak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia. Soekarno disebutkan sebagai individu yang dapat menampung beberapa konsep pemikiran dari beberapa aliran dalam bernegara seperti Nasionalisme, Islamisme, dan Sosialisme namun tidak sampai titik yang memihak salah satu aliran. Disertasi ini dapat membantu peneliti untuk

¹⁸ Anwar Sanusi, “Pemikiran Transformatif Ir Soekarno dalam Politik Islam”. *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

mengetahui bagaimana pola politik yang dipilih oleh Soekarno dalam menentukan konsepsi-konsep yang pada siste Demokrasi Terpimpin seperti Nasakom. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan membahas kebijakan Soekarno dalam konflik politik yang terjadi antara partai Islam dengan partai Komunis yang merupakan penelitian dengan pendekatan historis.

Tinjauan pustaka yang keempat adalah skripsi yang berjudul “Kebijakan Soekarno Terhadap Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin”, yang ditulis oleh Ryan Daya Mauryandaswara¹⁹. Dalam skripsi tersebut penulis memaparkan kebijakan presiden Soekarno dalam membubarkan partai Masyumi dan PSI akibat menentang konsep Demokrasi Terpimpin. Penulis juga menganalisa bagaimana partai-partai Islam terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu yang berdamai dengan Demokrasi Terpimpin dan Kubu yang menentangnya. Dijelaskan dalam skripsi bahwa partai Masyumi dan PSI merupakan kubu yang menentang dan partai NU, Perti, dan PSII merupakan partai yang berdamai dengan pemerintahan Soekarno. Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai subjek penelitian, yang mana subjek penelitian dalam penelitian ini bukan hanya mengenai parpol Islam tetapi juga Partai Komunis Indonesia. Serta dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konflik yang terjadi dalam parlemen serta media pers partai Islam dan Komunis selama pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

¹⁹ Ryan Daya Mauryandaswara, “Kebijakan Soekarno Terhadap Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Selanjutnya adalah, jurnal berjudul “Sikap dan Kebijaksanaan Soekarno terhadap Islam Pasca Kemerdekaan”, yang ditulis oleh Anwar Sanusi²⁰. Jurnal ini membahas mengenai kebijakan Soekarno terhadap partai dan tokoh-tokoh Islam yang menolak konsep NASAKOM sebagai jalan keluar persoalan integrasi dalam pemerintahan demokrasi terpimpin. Jurnal ini banyak menyebutkan tentang kebijakan-kebijakan Soekarno yang resisten terhadap Islam yang dianggapnya sebagai penghalang revolusi demokrasi terpimpin. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengetahui apa saja kebijakan Soekarno yang dianggap represif terhadap Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian yang akan peneliti fokuskan pada kebijakan politik Soekarno terhadap Islam dan konflik yang muncul dari kebijakan tersebut.

G. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan publik (*public policy*) yang digunakan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soekarno terhadap konflik politik antara partai Islam dengan partai Komunis dalam pemerintahan demokrasi terpimpin. Kebijakan Soekarno pada model pemerintahan demokrasi terpimpin adalah suatu ketetapan yang tertinggi oleh karena itu selama penerapan demokrasi terpimpin seluruh pemerintahan negara berada dalam kekuasaan Soekarno sebagai pemegang kekuatan eksekutif, legislatif, dan

²⁰ Anwar Sanusi, “Sikap dan Kebijaksanaan Soekarno terhadap Islam Pasca Kemerdekaan”. *Jurnal Tamaddun*. Vol. 6 No. 2, 2018.

yudikatif. Formulasi kebijakan publik terdiri dari berbagai teori untuk menjelaskan konteks dari perbuatan kebijakan²¹.

Untuk meneruskannya dalam penelitian ini menggunakan teori *Political System* atau Sistem Politik²², yang mana teori ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi yaitu *inputs*, *withinputs*, *ouputs*, dan *feed backs*. Dalam teori ini kebijakan publik dipandang sebagai hasil dari sistem politik, sebagaimana pada pemerintahan Soekarno ketika menggunakan sistem demokrasi terpimpin kebijakan yang dihasilkan merupakan presentasi dari konsep Demokrasi Terpimpin (Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan). Sistem politik memiliki artian sebagai sejumlah lembaga dan segala aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan, dan dukungan sebagai *input* menjadi *output* yaitu kebijakan. Pemerintahan demokrasi terpimpin menempatkan Soekarno sebagai puncak kekuasaan, oleh karena itu lembaga dan aktivitas politik pada masa itu dominan pro kepada Soekarno sehingga *output* atau kebijakan adalah produk dari kekuasaan Soekarno.

Selanjutnya agar mempermudah untuk menggambarkan bagaimana konflik yang terjadi dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin peneliti juga menggunakan Teori Konflik. Istilah konflik secara bahasa berasal dari kata *Con* yang berarti ‘bersama’ dan *Fligere* yang berarti ‘benturan/tabrakan’²³. Lebih

²¹ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : PT Leutika Nouvalitera, 2015), hlm. 13.

²² *Ibid*, hlm. 11-12.

²³ Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial : Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Nusa Tenggara Barat : IAIN Mataram, 2016), hlm. 8.

lanjut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa, konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceiver divergence of interest*)²⁴. Konflik ditimbulkan sebab perbedaan dan perbedaan ini dapat dipicu oleh berbagai hal seperti ras, suku, agama, aliran politik, dan segala hal yang memiliki unsur-unsur perbedaan.

Dalam penelitian ini diuraikan sistem Demokrasi Terpimpin sebagai pemicu konflik antara partai-partai Islam dengan partai Komunis terkait pada kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Kemudian juga dipicu oleh perbedaan aliran politik antara parpol yang berhaluan Islam yang diwakili oleh Masyumi, NU, PSII, dan PERTI dengan parpol yang berhaluan Komunis yaitu Partai Komunis Indonesia. Dengan Teori Konflik ini peneliti mencoba untuk mengetahui apa dan bagaimana unsur persepsi perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak-pihak partai Islam dan PKI dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Kemudian guna menyederhanakan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti menyajikan definisi konseptual untuk memberikan gambaran mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah bentuk dari intervensi pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan dalam berbagai hal tergantung penekanan dari bidang-bidang

²⁴ *Ibid*, hlm. 11.

terkait, oleh karena itu terdapat batasan-batasan tertentu sebagai keperluan untuk membentuk suatu kerangka guna menjelaskan kegunaan dari suatu definisi atau konsep kebijakan publik²⁵. Secara umum kebijakan publik adalah segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dari definisi tersebut dapat dilihat adanya hubungan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan. M. Irfan Islamy menerangkan lebih detail mengenai apa yang dimaksud tentang kebijakan publik yang menurutnya ada 4 elemen penting di dalam suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Namun pada praktiknya dilapangan dalam perumusan kebijakan publik dipengaruhi oleh adanya aktor yaitu penguasa dalam sistem politik dan keterlibatan aktor tersebut yang menjadi ciri khusus dalam kebijakan publik. Melalui kebijakan publik pemerintah memiliki kekuatan dan

²⁵ Nuryanti Mustari, 2015, *Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*,, hlm.3-4.

kewenangan untuk menata kehidupan masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan, oleh sebab itu kebijakan publik terkadang menuai pro dan kontra dari masyarakat.

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang menggunakan demokrasi dengan menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno periode 1959-1965. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dipublikasikan pertamakali oleh Soekarno di depan sidang Konstituante pada 27 Januari 1957²⁶. Soekarno menyampaikan gagasan pembaharuan politik, kehidupan sosial, dan ekonomi yang di dasari pada sistem demokrasi terpimpin di dukung dengan kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang (Nasakom)²⁷. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi penolakan dari Soekarno terhadap Demokrasi Parlementer yang sistem pemerintahannya di dominasi oleh kekuatan partai (DPR, dan Konstituante). Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menjadikan adanya sentralisasi kekuatan pada diri Presiden Soekarno.

3. Nasakom

Nasakom adalah singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme yang merupakan konsep politik atau dapat dikatakan sebagai

²⁶ Sudarwanto Pujosantoso, *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1960)*, Pontianak : Derwati Press, 2018, hlm. 59.

²⁷ Arin Kusumaningrum, *Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966*, (Jakarta : Pustaka Abadi, 2019), .hlm. 2.

ideologi pemerintahan demokrasi terpimpin²⁸. Soekarno dalam bukunya “Di Bawah Bendera Revolusi” menjelaskan bagaimana ia memandang Nasionalisme, Islamisme, dan Komunisme sebagai asas-asas perjuangan pergerakan rakyat di seluruh Asia melawan kolonialisme Eropa²⁹. Soekarno juga meyakini Nasakom sebagai nyawa dari pergerakan di Indonesia dengan menyebutkan, :

“Boedi Oetomo, Sjarikat Islam, dan Partai Komunis Indonesia dan masih banyak partai-partai lain ... itu masing-masing mempunyai rokh Nasionalisme, Islamisme, atau rokh Marxisme. Dapatkah rokh-rokh ini dalam politik jajahan bekerja bersama-sama menjadi satu. Rokh yang besar, rokh persatuan? Yang akan membawa kita ke lapang ke-Besaran?

...

Tidak adalah halangannya Nasionalis itu dalam geraknya bekerja bersama-sama dengan kaum Islamis dan Marxis. ... Bukannya kita mengharap, yang Nasionalis itu supaya berubah menjadi faham Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita itu menyuruh Marxis dan Islamis berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu”³⁰

Soekarno mengharapkan adanya tiga golongan yang berpartisipasi dalam pemerintahan untuk mewujudkan kekuatan persatuan yang sebenarnya. Konsepsi Nasakom ini kemudian diterapkan dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin-nya dan menjadikan PKI turut serta dalam kabinet, DPR, dan lembaga negara lainnya.

4. Konflik Partai Islam dengan Partai Komunis

Konflik yang dikaji dalam penelitian adalah konflik mengenai perbedaan sudut pandang terhadap kebijakan pemerintahan demokrasi

²⁸ *Ibid*, hlm. 108

²⁹ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta : Banana Books, 2016), hlm. 1.

³⁰ *Ibid*, hlm. 2-5.

terpimpin. Partai Islam yang terbentuk saat itu merupakan alumni dari pemilu 1955 yang terdiri dari Partai Masyumi, PERTI, PSII, PSI, dan NU dan partai yang berhaluan komunis adalah PKI. Sejak diumumkannya manifesto politik atau revolusi politik dalam pidato berisikan kembali berlakunya UUD 1945 dan sistem Demokrasi Terpimpin terjadi reaksi politik antara partai-partai yang berhaluan Islam dengan partai yang berhaluan Komunis. Di kubu partai berhaluan Islam sendiri terpecah menjadi dua yaitu, Masyumi dan PSI yang kontra dengan Demokrasi Terpimpin kemudian ada PSII, PERTI, dan NU yang juga melakukan penolakan namun tidak sefrontal Masyumi. Sedangkan PKI menjadi partai yang merasa diuntungkan dengan revolusi politik Soekarno dan memperoleh kedudukan politik yang lebih tinggi dari sebelumnya yang berada di bawah partai Masyumi.

Partai-partai Islam yang sebelumnya berada dekat dengan pemerintahan pada masa revolusi politik Demokrasi Terpimpin beralih menjadi oposisi dan PKI yang sebelumnya tidak dominan dalam pemerintahan memperoleh kedekatan dengan penguasa sebab kemiripan ideologi dengan politik Demokrasi Terpimpin. Perubahan yang demikian memicu adanya konflik politik ditandai dengan adanya propaganda-propaganda saling menjatuhkan antara kubu baik melalui pers ataupun pada sistem politik dalam parlemen demokrasi terpimpin. Kebijakan politik Soekarno selama memimpin pemerintahan demokrasi terpimpin selalu retensi terhadap oposisi Ia dengan kukuh menghilangkan segala hal yang

dianggapnya sebagai penghalang revolusi dengan kekuasaan mutlaknya. Namun di akhir kepemimpinannya PKI melakukan kudeta dan Soekarno mengeluarkan kebijakannya untuk menstabilkan situasi politik dengan memberantas Partai Komunis Indonesia.

H. Metode Penelitian

Sejarah adalah peristiwa masa lampau yang meliputi apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dan dialami oleh seseorang. Penelitian sejarah berupaya mengkaji dan menganalisa secara sistematis dan objektif terhadap persoalan masa lampau dan bertujuan untuk mendeskripsikannya. Oleh karena itu, pada penelitian yang berjudul Kebijakan Politik Soekarno terhadap Konflik Islam dan Komunis dalam Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965 dan menulisnya dalam bentuk penulisan sejarah, maka penulis menggunakan metode sejarah, yaitu proses pengumpulan data kemudian menguji, menganalisis dan menafsirkan suatu gejala peristiwa atau gagasan yang muncul pada masa lampau³¹. Tahap-tahap yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian sejarah adalah sebagai berikut :

1. Heuristik, merupakan tahap pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber literatur dari beberapa buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian, yaitu dalam hal ini mengenai sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dan hubungan Soekarno dengan Islam. Sumber yang diperoleh didapat dari sumber primer

³¹ Keith Faulks, *Sosiologi Politik : Pengantar Kritis*, (Bandung : Nusa Media, 2015), hlm. 98.

dan sekunder yang dicari. Dalam upaya pengumpulan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini, penulis mencari di Internet dan beberapa perpustakaan yang berada di Surakarta dan Yogyakarta, seperti Jogja Library Center, Monumen Pers, dan perpustakaan online IPUSNAS.

2. Kritik Sumber, yaitu berbagai sumber yang sudah didapatkan selanjutnya dilakukan verifikasi guna memperoleh data yang valid atau orisinal. Kritik ekstern untuk menguji dan meneliti keaslian sumber yang telah diperoleh, sehingga validitas sumber tersebut dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan kritik intern untuk mengetahui kredibilitas sumber. Dalam penelitian ini dilakukan kritik intern, dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai sumber yang sudah didapatkan. Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara isi sumber yang satu dengan yang lain guna menemukan keabsahan sumber dan mengambil data yang bisa dipercaya.
3. Interpretasi, setelah melakukan verifikasi, langkah selanjutnya adalah penafsiran atau interpretasi terhadap sumber-sumber dan data yang sudah terkumpul. Interpretasi atau sering disebut analisis mempunyai pengertian menguraikan yang secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Dalam kerangka metode ini, peneliti memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh mengenai kebijakan politik Soekarno terhadap konflik antara Islam dan Komunis dalam pemerintahan demokrasi terpimpin.

4. Historiografi, adalah penulisan sejarah dari pengumpulan dan penyaringan fakta sejarah hingga menjadi kesimpulan akhir yang relevan. Pemahaman dan interpretasi fakta sejarah ditulis kembali menjadi suatu kisah sejarah yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang kemudian disajikan dalam bentuk penulisan deskriptif. Dalam kerangka metode ini peneliti mendeskripsikan tentang perjalanan pemerintahan demokrasi dipimpin Soekarno dalam rangka menyelesaikan konflik disintegrasi politik antara Islam dengan Komunis pada tahun 1959-1965.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan lebih jelas dan sistematis, dalam penyusunannya penulis membagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari delapan sub-bab yaitu : latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dalam bab ini dipaparkan objek penelitian berikut langkah-langkahnya dari awal sampai akhir.

Bab kedua mendeskripsikan mengenai latar belakang sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Deskripsi tersebut diawal dengan pembahasan mengenai sistem Demokrasi Parlemen yang kemudian beralih menjadi Demokrasi Terpimpin. Kemudian juga membahas tentang konsep-konsep Presiden Soekarno mengenai sistem Demokrasi Terpimpin.

Bab ketiga berisi tentang kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang diklasifikan menjadi penyebab adanya konflik politik antara partai-partai Islam dengan PKI. Kemudian juga berisi tentang bahasan mengenai pandangan-pandangan partai politik Islam dan PKI mengenai kebijakn-kebijikan tersebut.

Bab keempat berisi tentang pembahasan mengenai konflik-konflik politik yang terjadi antara partai-partai Islam dengan PKI dalam pemerintahan ataupun dalam media pers.

Bab kelima yaitu pentup yang berisi kesimpulan dari seluruh bahasan mengenai kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno dan konflik-konflik politik yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian bab ini diakhiri dengan kata penutup.

BAB II

LATAR BELAKANG DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Demokrasi Terpimpin

Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 akan tetapi kedaulatannya belum diakui sepenuhnya oleh Belanda. Belanda melancarkan Agresi Militer untuk menentang kemerdekaan Indonesia oleh karena itu perang antara Indonesia-Belanda kembali pecah dan puncaknya pemerintah Inggris tampil menjadi mediator perdamaian untuk menyelesaikan masalah politik dan militer di Indonesia¹. Usaha perdamaian tersebut menciptakan beberapa perundingan seperti Linggarjati (1947), Renville (1948), Roem-Royen (1949), dan Konferensi Meja Bundar (1949)². Pada intinya hasil dari ke semua perundingan tersebut merujuk pada kesepakatan untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan menetapkan wilayahnya, serta RIS menjadi bagian dari negara persemakmuran Belanda. Dengan demikian Belanda berhasil menciptakan negara federal yang ia paksakan terhadap Indonesia dan memecah kedaulatan bangsa dengan membentuk negara-negara bagian.

Pemerintahan RIS tidak berjalan lama, mosi intergral yang dicetuskan Moh Natsir membuat negara-negara bagian yang meliputi Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Sumatra

¹ Herbert Feith, 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, ...*, hlm. 18

² M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since C. 1200*, (New York : Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 322.

Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, dan Negara Sumatra Selatan semuanya memilih untuk membubarkan diri dan bergabung dengan Negara Republik Indonesia di Yogyakarta, dengan demikian diumumkanlah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus pembubaran RIS oleh Soekarno pada 17 Agustus 1950³. Setelah pembubaran RIS dan pembentukan NKRI pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen, dengan demikian Indonesia saat itu menggunakan sistem Demokrasi Parlementer⁴. Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-undang No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Negara Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Problem pertama yang dihadapi parlemen pasca bubarnya RIS adalah menyusun Konstitusi negara yang mana pada prosesnya tidak berjalan dengan lancar sebab situasi politik yang tidak stabil akibat banyaknya parpol-parpol yang bertentangan dalam parlemen. Partai politik yang berkuasa ketika itu adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) di mana PNI adalah partai yang berhaluan Nasionalisme dan Masyumi adalah partai yang berhaluan Islam. Perdana Menteri dijabat bergantian dari tokoh-tokoh kedua partai tersebut namun, kabinet yang terbentuk tidak berumur panjang. Tercatat telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama 9 tahun pemerintahan model demokrasi parlementer⁵.

³ *Ibid*, hlm. 341-342.

⁴ Sudarwanto Pujosantoso, 2018, *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan...*, hlm. 19

⁵ *Ibid*, hlm. 68

Kendati demikian sistem demokrasi parlemen sukses mengadakan pemilu pertama kali pada tahun 1955 untuk memperebutkan 260 kursi di DPR dan 514 kursi Dewan Konstituante, pemilu untuk DPR dengan rincian sebagai berikut PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 46 kursi, dan PKI 39 kursi dan sisanya dimiliki oleh partai-partai kecil⁶. Sementara itu, Dewan Konstituante diketuai oleh Wilopo dari fraksi PNI dan memiliki 5 wakil secara berurutan dari yang pertama yaitu, : Prawoto Mangkusasmito dari fraksi Masyumi, Johannes Leimena dari fraksi Parkindo, Fathurrahman Kafrawi dari fraksi NU, Sukirman dari fraksi PKI, dan Ratu Aminah Hidayat dari fraksi IPKI⁷. Dari setiap fraksi yang berada dalam tubuh Konstituante tersebut melahirkan 3 blok utama yang mewakili setiap asas dalam menyusun Konstitusi yaitu blok Pancasila (274 kursi), blok Islam (230 kursi), dan blok Sosio-Ekonomi (10 kursi)⁸.

Pada tahun yang sama 1959 Presiden Soekarno mulai mempertegas idealismenya untuk meninggalkan demokrasi Barat sebab situasi politik yang semakin tidak stabil sebagai akibat dari kebebasan berekspresi yang berlebihan⁹. Penyampaian konsepsi Presiden Soekarno mengenai sistem demokrasinya kemudian membuat diadakannya pemungutan suara dalam parlemen untuk kembali ke-UUD 1945 namun perolehan suaranya tidak

⁶ Miriam Budiardja, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 433

⁷ Sudarwanto Pujosantoso, 2018, *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi...*, hlm. 32.

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta : Pustaka Utama Pelajar, 2009), hlm. 32.

⁹ Herbert Feith, 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, ...*, hlm. 418.

sampai pada $\frac{2}{3}$ persen dari keseluruhan sehingga tidak dapat dilaksanakan. Kegagalan Konstituante dalam membentuk undang-undang dasar baru semakin memanas dan sebagian besar fraksi anggotanya berencana untuk menarik diri dari sidang Konstituante.

Gambar 1.1
Presiden Soekarno membacakan Dekrit 5 Juli 1959



(Sumber : Kompas <https://www.kompas.com/stori/read/2021>)

Banyaknya fraksi-fraksi yang mengancam untuk mengundurkan diri dari Konstituante memberikan dampak ketidakstabilan politik yang dapat memicu konflik lain. Keadaan genting tersebut Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit yang berisi tentang pembubaran Konstituante, penggunaan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan pembentukan MPRS. Akibat dari diterbitkannya Dekrit tersebut sistem pemerintahan Indonesia kembali pada Pancasila dengan pemerintahan Presidensial dan jabatan Perdana Menteri dihilangkan¹⁰. Dengan bubarnya Konstituante dan berlakunya sistem Presidensial maka mengakhiri pemerintahan Demokrasi Liberal dan Soekarno secara sepihak memutuskan konsep Demokrasi

¹⁰ Sudarwanto Pujosantoso, 2018, *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi...*, hlm. 73.

Terpimpin sebagai jalan demokrasi pemerintahan yang baru sebagaimana ia sampaikan dalam pidatonya 17 Agustus 1959.

Konsep demokrasi yang di-*ugemi* Soekarno adalah tentang bagaimana semua kelompok masyarakat dapat ter-refleksi dalam satu kesatuan, sehingga dikenalkanlah ideologi Nasakom yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan¹¹. Untuk mempertahankan ideologinya tersebut Soekarno membuat sistem Demokrasi Terpimpin dengan jabatan Presiden dijadikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Soekarno membentuk sendiri kabinet, menunjuk anggota-anggota parlemen seperti MPRs dan DPR-GR, serta dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan sendiri (Penpres/Perpres)¹².

B. Konsepsi Demokrasi Terpimpin

27 Januari 1957 Presiden Soekarno memberikan pidato yang berjudul “Menyelamatkan Republik Proklamasi” di hadapan dewan sidang Konstituante¹³. Dari pidato tersebut Soekarno menyampaikan suatu konsepsi atau gagasannya mengenai Demokrasi Terpimpin sebagai jalan keluar dari jeratan demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Soekarno menjelaskan tentang demokrasi berdasarkan pemahamannya yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia yaitu, demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan gotong royong di bawah tuntunan seorang pemimpin¹⁴.

¹¹ *Ibid*, hlm. 76.

¹² Arin Kusumaningrum, 2019, *Masa Demokrasi Terpimpin*,..., hlm. 2.

¹³ Sudarwanto Pujosantoso, *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1960)*, Pontianak : Derwati Press, 2018, hlm. 59.

¹⁴ , *Jurnal Sosiologi*, hlm 57.

Soekarno juga menyampaikan suatu solusi secara teknis yang ditawarkan Soekarno adalah tentang pembentukan Kabinet Gotong Royong yang berpartisipasi seluruh partai yang ada (termasuk PKI), dan pembentukan Dewan Nasional (DPAS) yang terdiri dari perwakilan setiap golongan dengan Soekarno sendiri sebagai pemimpinnya¹⁵.

Berdasarkan uraian di atas setidaknya terdapat tiga hal pokok dalam konsepsi Soekarno tersebut, :

- 1) Memperkenalkan model kepemimpinan baru yang menonjolkan sosok pemimpin ideal bagi masyarakat,
- 2) Mewujudkan konsepsi baru tentang musyawarah dan gotong royong dengan Kabinet Gotong Royong yang memasukkan seluruh partai politik termasuk PKI.
- 3) Pembentukan dewan nasional atau yang disebutkan sebagai Dewan Pengawas Agung Sementara (DPAS) yang berisikan seluruh perwakilan dari golongan fungsional yang mencerminkan masyarakat secara keseluruhan¹⁶.

Menurut Soekarno usulan mengenai Kabinet Gotong Royong yang merangkul PKI di dalamnya adalah karena PKI juga merupakan bagian dari revolusi yang berhak diberi kesempatan dalam pembentukan suatu kesepakatan nasional¹⁷. Konsepsi Soekarno ini kemudian menjadikan anggota-anggota

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin : Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang", *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 1 2020, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 58.

¹⁷ , *Jurnal Sosiologi*, hlm 58.

Konstituante terpecah menjadi dua kubu yang setuju dan tidak setuju dengan konsepsi tersebut¹⁸. Dengan demikian karena terdapat sebagian anggota Konstituante yang tidak setuju maka konsepsi tersebut belum dapat direalisasikan. Di sisi tugas penyusunan UUDS 1950 oleh Kosntituante belum juga terselesaikan dan hal ini membuka kesempatan bagi Soekarno sebagai Presiden untuk turun tangan mengambil tindakan. Pada 1959 Presiden Soekarno mengumkan Keppres No. 150 atau yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya, :

1. Membubarkan Konstituante
2. Memberlakukan Kembali UUD 1945
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
4. Pembentukan Golongan Fungsional¹⁹

Dengan adanya Dekrit tersebut Soekarno memulai langkah awal realisasi konsep Demokrasi Terpimpin dan langkah awal yang ia lakukan adalah dengan membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Konstitusi. Setelah itu Soekarno juga meletakkan pondasi politik yang kuat dengan membentuk ulang struktur pemerintahan dengan menambahkan golongan fungsional sebagai salah satu komponen politik selain partai.

¹⁸ Arin Kusumaningrum, 2019, *Masa Demokrasi Terpimpin,...*, hlm. 5.

¹⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang 1945. Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75 Yang Telah Dicitak Ulang. Diunduh pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detailis/96516/keppres-no/150/tahun-1959>.

BAB III

KONDISI POLITIK PEMERINTAHAN DEMOKRASI TERPIMPIN SERTA KONFLIK POLITIK DI DALAMNYA

A. Kebijakan Presiden Soekarno Dalam Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Nasakom dan Manifesto Politik Indonesia USDEK merupakan dua konsepsi yang muncul dan berkembang pada saat Presiden Soekarno memberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin. Setelah mengeluarkan Dekrit, Soekarno menganggap jika Revolusi Indonesia telah ditemukan kembali sebagaimana ia sampaikan dalam pidatonya “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Kemudian Soekarno mengembangkan doktrin-doktrinnya menjadi suatu yang lebih jelas sebagai suatu kebijakan yang mengatasnamakan revolusi. Nasakom dan Manipol USDEK itulah yang kemudian memiliki fungsi sebagai doktrin dan kebijakan untuk mencapai revolusi yang dimaksud oleh Soekarno tersebut.

1. Nasakom

Menurut Soekarno terdapat tiga haluan utama pergerakan rakyat Indonesia yang sudah ada sejak penjajahan Eropa, yaitu Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis¹. Soekarno mengatakan bahwa persatuan dari ketiga kekuatan tersebut akan menjadi suatu kekuatan yang “maha besar maha kuat, suatu tombak-taufan yang tak dapat ditahan terjangnya”². Untuk

¹ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Banana Books, 2016, hlm. ii.

² *Ibid.*

mencapai persatuan tersebut memerlukan seseorang yang menjadi ‘juru mudi’ yang akan membuat dan mengemudikan ‘kapal persatuan’. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nasakom adalah persatuan dari tiga golongan kekuatan politik yang meliputi golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis dengan di bawah suatu kepemimpinan.

Soekarno menjadikan Nasakom sebagai alat untuk memperkuat sistem Demokrasi Terpimpin dengan membuatnya sebagai dasar atau poros pada pemerintahan³. Poros Nasakom tersebut diterapkan di seluruh bidang pemerintahan, sehingga lembaga-lembaga pemerintahan yang terbentuk setelahnya terdiri dari anggota-anggota yang mewakili setiap golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis⁴. Kemudian untuk semakin melegitimasi Nasakom dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Soekarno menegaskan bahwa Nasakom merupakan perasan dari Pancasila⁵. Soekarno dalam buku “Pertjajalah Pada Benarnja Nasakom” memberikan penjelasan terkait Nasakom merupakan perasan dari Pancasila, :

“Pancasila dapat kita peras menjadi tiga, Trisila : Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi. Tiga kalau kita persatukan Kebangsaan dengan peri-kemanusiaan.- sila dua dan sila tiga kita peras menjadi satu-, menjadilah ia sosio-nasionalisme, dan jika sila keempat, Kedaulatan Rakyat dengan sila kelima, Keadilan Sosial, perasannya itu adalah sosio-demokrasi, sehingga perasan daripada lima ini menjadi tiga : Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi. Tetapi aku lantas berkata kepada sidang, barangkali tuan-tuan toh belum senang kepada angka tiga,

³ Lingga Winata, “Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1966”, *Jurnal Pendidikan Sejarah AVATARA*, (Vol. 5 No. 3 Oktober 2017), Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 731

⁴ *Ibid.*

⁵ Budi Setyono dkk, *Revolusi Belum Selesai*, (Jakarta : Serambi, 2014), hlm. 214. <https://books.google.co.id/books?id=ptiFCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>, diakses pada 6 Oktober 2023 pukul 16.32 WIB.

barangkali tuan-tuan senang kepada angka satu, wahai, kataku, peraslah tiga ini menjadi satu, menjadi Ekasila- eka artinya satu- dan apakah Ekasila itu? Ekasila itu adalah gotong royong. Dan aku ulangi, saudara-saudara dengan prinsip gotong-royong ini, dengan kenyataan gotong royong ini, kita makin lama makin kuat.⁶

Jika penulis simpulkan maka, Sosio-Nasionalisme merupakan ‘NAS’, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ‘A’, dan Sosio-Demokrasi merupakan ‘KOM’. Dengan demikian Soekarno berusaha mesinkretiskan ketiganya menjadi suatu ideologi yang utuh yaitu NASAKOM⁷. Namun usaha sinkretisasi Nasakom tersebut terbentur dengan Komunis yang dianggap anti dengan Ketuhanan sehingga menimbulkan gejolak konflik atau pertentangan dari golongan Islam. Benturan yang terjadi antara golongan Islam dengan Komunis inilah yang kemudian menyebabkan Nasakom oleh sebagian golongan Islam ditolak. Rekam jejak PKI yang di Madiun misalnya, menambahkan ketakutan dan kekhawatiran golongan Islam terhadap bahaya laten Komunis. Kendati demikian Soekarno tetap pada prinsipnya tentang Nasakom, dan ketakutan atau sentimen terhadap Komunis tersebut harus disingkirkan demi kepentingan Nasional dan penuntasan Revolusi Nasional. Berikut kutipan perkataan Soekarno dalam amanatnya untuk kader-kader Nasakom, :

“Kita tidak harus takut pada Nasakom, kita tidak harus takut pada apa yang dinamakan momok Komunis. Tidak, saudara-saudara. Malahan sekarang ini kita harus satu persatuan total yang tetap berporos Nasakom.”⁸

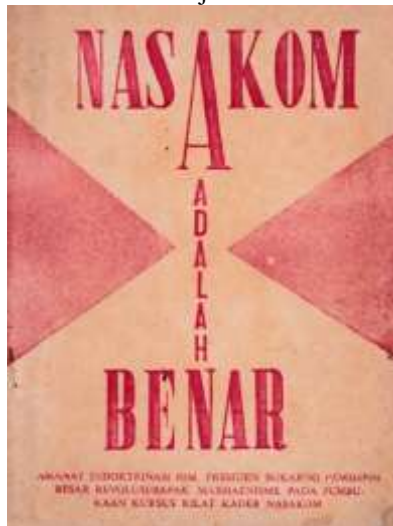
⁶ Departemen Penerangan R.I, *Pertjajalah Pada Benarnja Nasakom : Amanat-Indoktrinasi Presiden Soekarno Pada Pembukaan Kursus Kilat Kader Nasakom*, (Jakarta : Penerbitan Khusus, 1965), diunduh pada <https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/48420>), hlm. 12.

⁷ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta : Pandji Masjarakat, 1960), hlm. 8.

⁸ Departemen Penerangan R.I, (1965), *Pertjajalah Pada Benarnja Nasakom.....*, hlm. 16.

Nasakom sudah menjadi ideologi persatuan yang ditetapkan secara pribadi oleh Soekarno. yang demikian menyebabkan golongan Islam tidak dapat menolak keikutsertaan Komunis (PKI) dalam pemerintahan dan ‘terpaksa’ bekerja sama mengikuti konsepsi Pemerintahan Demokrasi Terpimpin karena kekuatan politik utama sistem tersebut berada di dalam diri Soekarno sebagai Presiden⁹. Sehingga yang demikian penulis simpulkan tidak ada yang benar-benar menerima Nasakom dengan yakin dan sepenuh hati.

Gambar 1.3
Cover buku doktrinasi ajaran Nasakom Soekarno



(Sumber: *Republika* <https://news.republika.co.id/berita/r0858m385>)

Poros Nasakom selain sebagai ideologi persatuan juga menjadi alat Soekarno untuk menyeimbangkan kekuatan politik dalam pemerintahan antara ketiga golongan yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis¹⁰. Nasionalis adalah golongan yang terdiri dari partai politik berhaluan Pancasila dan

⁹ Lingga Winata, (2017), “Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1966..”, hlm. 731.

¹⁰ Sudarwanto Pujosantoso, *Demokrasi Liberal (1950-1959)*..., hlm. 67-68. Lihat Juga Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81.

satuan militer, Agama adalah partai politik besar berhaluan Islam seperti Masyumi, dan NU, sementara Komunis adalah Partai Komunis Indonesia¹¹. persamarataan kekuatan politik ini salah satunya dapat dilihat dalam susunan anggota DPR-GR yang di uraikan dalam tabel sebagai berikut, :

Tabel 1.1
Susunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Fraksi	Jumlah Kursi
PNI	44
NU	36
PKI	30
PARTAI MURBA	10
PARKINDO	6
PSII	5
Partai Katholik	5
PERTI	2
Partai Murba	1
Partindo	1
ABRI	35
Tani	25
Buruh	26
Alim Ulama Islam	24
Pendeta Protestan	3
Pendeta Katholik	2
Hindu Bali	2
Cendikiawan/Pendidik	5
Wanita	8
Kooperasi	3
Pengusaha Nasional	2
Angkan 45'	2
Veteran	1
Seniman	1
Wartawan	2
Pemuda	9
WAKIL DAERAH (IRIAN BARAT)	1

(Sumber: Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 tentang

¹¹ Lingga Winata, (2017), "Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1966..", hlm. 731.

Dalam susunan DPR-GR yang tidak megikutsertakan Masyumi ini mengurangi sebagian besar suara Islam dalam parlemen sehingga berkurang lebih dari separuhnya (dari jumlah dalam DPR sebelumnya). Meskipun jumlah kursi untuk PKI juga dikurangi namun jumlahnya tetap berkisar pada 30-an kursi sehingga tidak terlampau jauh dari golongan Nasionalis dan Islam. Dengan demikian terciptakan kesejajaran kekuatan politik di antara ketiga golongan tersebut dalam parlemen. Lebih lanjut Soekarno juga melegitimasi Nasakom ke dalam berbagai bidang pemerintahan seperti Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Transmigrasi, hingga Pendidikan diberlakukan poros Nasakom¹².

Nasakom merupakan suatu ideologi yang murni lahir dari gagasan Soekarno terhadap persatuan dan revolusi. Nasakom menjadi suatu landasan baru disamping Pancasila dan menjadi tiang pondasi pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Nasakom dalam implementasinya memaksakan ketiga golongan untuk dapat saling bekerjasama di bawah suatu kepemimpinan yang memiliki kewenangan mutlak oleh Presiden Soekarno. Nasakom berjalan dengan memberikan keuntungan politik bagi golongan Komunis PKI yang semakin merapatkan barisannya dalam pemerintahan. Nasakom yang telah menjadi ideologi itu membuat golongan Islam terpaksa

¹² Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1965 Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi, Lembaran Negara Tahun 1965 Yang Telah Dicitak Ulan No. 33. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1963 LN No. 1963/95 TLN No. 2590.

menerima PKI dan sebagian yang lain ada yang tetap bersikukuh menolaknya namun berakhir pada pembungkaman.

2. Manifesto Politik Indonesia USDEK

Mengutip dari pembukaan dalam buku “Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”. Disebutkan bahwa, dalam melaksanakan Pancasila dan menyelesaikan Revolusi-nya Bangsa Indonesia telah menemukan kembali revolusinya dan juga sebagai jalan yang benar untuk menyelesaikan revolusi. Yaitu, pada pidato Presiden “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian disebut Manifesto Politik Indonesia¹³. dalam pidato tersebut terdapat lima intisari yang disimpulkan sebagai USDEK : Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia¹⁴. sebelum membahas tentang USDEK terlebih dahulu penulis tampilkan analogi Soekarno terhadap Manipol Usdek dengan Pancasila, :

“Ada orang yang menanya : “Kenapa Manifesto Politik? Kan kita sudah punya Pancasila?”. Manifesto Politik adalah pemancaran dari Pancasila! USDEK adalah pemancaran dari Pancasila. Manifesto Politik, USDEK, dan Pancasila adalah terjalin satu sama lain, tak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika saja harus mengambil *qiyas* agama, sekedar *qiyas*! Maka saya katakan : Pancasila adalah semacam *Qur'an*-nya, dan Manifesto Politik dan USDEK adalah semacam *Hadist-Shahihnya*, (Awas! Saya tidak mengatakan bahwa Pancasila adalah *Qur'an* dan Manifesto Politik-USDEK adalah *Hadist!*). *Qur'an* dan *Hadist* merupakan satu kesatuan, maka Pancasila dan Manifesto dan USDEK pun merupakan satu kesatuan!. Masih saja ada yang bertanya : “Apa Pancasila saja tidak cukup?”

¹³ Departemen Penerangan RI, “Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Indonesia”, (Jakarta : Perpustakaan Fakultas Sastra UI, Tahun 1961), No. 992.07/D326/P, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20393021>, diunduh pada 19 Agustus 2023 pukul 10.43 WIB, hlm. 9-10

¹⁴ Departemen Penerangan RI, “Amanat Presiden Soekarno Pada Sata Pelantikan Pengurus Besar Front Nasional Di Istana Negara”, (Jakarta : Penerbit Khusus, Tahun 1960), hlm. 3.

Pertanyaan ini sama saja dengan pertanyaan : “Apakah *qur'an* saja tidak cukup?” *qur'an* dijelaskan dengan *hadist*, Pancasila dijelaskan dengan Manifesto Politik serta intisarinya yang bernama USDEK.”¹⁵.

Berdasar uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Manifesto Politik (Manipol)-USDEK merupakan visi-visi yang digagas oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Visi-visi tersebut dijadikan sebagai dasar-dasar Revolusi Nasional dan kemudian disejajarkan dengan Pancasila sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara melalui Ketetapan MPRS¹⁶.

Penjelasan mengenai USDEK selain diuraikan pada pidato Presiden juga diperjelas melalui buku pedoman sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam buku tersebut setidaknya penulis dapat menyimpulkan terkait UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Pertama, penggunaan UUD 1945 sebagai konstitusi adalah hal yang sudah sewajarnya dilakukan untuk mengikis liberalisme. Kedua, Sosialisme Indonesia pada intinya adalah tentang mencapai Indonesia yang ‘ber-Sosialisme Indonesia’ dan bersih dari Kapitalisme¹⁷, lebih lanjut Soekarno menegaskan “Bagi orang Revolusioner sejati tidak peduli bila ada yang meng-cap ‘kiri’ atau meng-cap ‘komunis’, asal saja baik untuk rakyat Indonesia kita laksanakan. Dan semua orang revolusioner adalah orang ‘kiri’¹⁸”. Ketiga, Demokrasi Terpimpin yang

¹⁵ Departemen Penerangan RI, (1961), “Pedoman-Pedoman Pelaksanaan....”, hlm. 36-37.

¹⁶ TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara.

¹⁷ Departemen Penerangan RI, (1961), “Pedoman-Pedoman Pelaksanaan....”, hlm. 13.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

Soekarno katakan mengenai hal ini adalah “Suatu Revolusi hanya dapat berlangsung dan berakhir secara baik, jika ada satu Pimpinan yang Revolusioner”¹⁹. Keempat, Ekonomi Terpimpin merupakan menjadikan negara sebagai pemegang atas pengelolaan sumber daya dan perusahaan-perusahaan²⁰. Kelima, Kepribadian Indonesia yang disimpulkan oleh Soekarno adalah tentang ‘Gotong Royong’ sebagaimana yang ia sampaikan “Gotong royong bukan sekedar satu sifat kepribadian Indonesia, gotong royong bukan sekedar corak daripada *Indonesian Identity!*, gotong royong adalah juga satu keharusan dalam perjuangan melawan imperialisme dan kapitalisme, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Oleh karena itu Saya tegaskan perlunya persatuan dan ke-gotong royongan antara golongan Islam, Nasional, dan Komunis”²¹.

Presiden Soekarno kemudian melakukan *Retooling* terhadap lembaga negara, dan partai-partai. Salah satu bentuk *retooling* tersebut dalam dengan membentuk Front Nasional secara khusus dengan Penpres No. 13 Tahun 1959. Pembentukan organisasi ini kemudian menjadikan Manipol-USDEK semakin kuat sebagai ideologi ataupun haluan negara. Manipol-USDEK dijadikannya asas dari Front Nasional²², yang mana organisasi ini memiliki wewenang khusus yang diberikan oleh Presiden Sokarno yaitu, :

- a. Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat serta memimpin gerakan masyarakat untuk

¹⁹ *Ibid*, hlm. 13-14.

²⁰ *Ibid*, hlm. 19-20.

²¹ *Ibid*, hlm 14-15.

²² Departemen Penerangan RI, (1960), “Amanat Presiden Soekarno Pada....”, hlm. 3

menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, kemanan, dan pertahanan.

- b. Menyelenggarakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya²³.

Dalam susunan pengurus besar Front Nasional ini juga telah terlihat Poros Nasakom dengan adanya Ali Sostroamidjojo dari PNI, K.H. Idham Khalid dari Nu, dan D.N Aidit dari PKI²⁴. Dengan demikian Manipol-USDEK juga memiliki corong suara yang secara langsung dihadapkan kepada masyarakat. *Retooling* yang selanjutnya adalah dengan membubarkan Masyumi dan PSI yang tidak mau menyesuaikan diri dengan Manipol-USDEK²⁵.

Gambar 1.2
Cover buku tentang Manifesto Politik
Indonesia yang menjadi doktrin utama Demokrasi Terpimpin



(Sumber: Perpustakaan Universitas Indonesia
<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20393021>)

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 13 Tahun 1959 Tentang Front Nasional.

²⁴ Departemen Penerangan RI, (1960), "Amanat Presiden Soekarno Pada....", hlm. 22-23.

²⁵ *Ibid*, hlm. 19.

Dalam proses mencapai revolusi tersebut bahkan Soekarno melakukan pembaharuan susunan DPR dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) sebagai bentuk dari pelaksanaan Manipol Usdek. Kebijakan Soekarno tersebut tentu mendapat penolakan dari pihak-pihak bahkan dianggap melanggar Konstitusi namun, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Manipol adalah pancaran dari Pancasila dan juga telah disahkan sebagai Haluan Negara.

B. Pandangan Partai Islam dan Partai Komunis Terhadap Demokrasi Terpimpin

1. Partai Politik Islam

Demokrasi Terpimpin membawa suatu konfigurasi atau penyetelan politik yang baru dengan Nasakom dan Manipol-USDEK sebagai suatu kebijakan memunculkan dualisme dalam lingkup partai-partai Islam. Dualisme yang terjadi adalah terkait perbedaan untuk menerima atau tidak menerima Naskom dan revolusi nasional Manipol-USDEK. Sementara partai-partai Islam yang dimaksud saat itu adalah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdhatul Ulama), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), dan Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia)²⁶. Diantara keempat partai tersebut Masyumi dan NU lah yang memiliki kekuatan politik

²⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin : Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang", *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 1 2020, hlm. 37.

terbesar dan memiliki peranan yang penting dalam Pemerintahan sebelumnya.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli berlaku partai-partai tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas jalannya partai untuk menyambut sistem pemerintahan yang baru. Sebagaimana NU pada Kongres NU ke-22 tahun 1959 K.H. Idham Kholid menyampaikan bahwa, NU menyatakan sikap akomodatif (penyesuaian) terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap masih sesuai dengan nilai-nilai Islam selama terdapat dua unsur yang saling melengkapi yaitu, unsur musyawarah yang menghargai pimpinan, dan unsur pimpinan yang menghargai musyawarah²⁷. Sementara itu terkait Nasakom Saifuddin Zuhri mengeluarkan pernyataan dengan menggunakan salah satu kaidah dalam *Ushul Fiqh*, “Apa yang tidak dapat diraih seluruhnya, sebagian yang dapat diraih jangan dilepaskan”²⁸. Nasakom yang sudah ditetapkan sebagai ideologi pemerintahan Soekarno tidak dapat diganggu gugat dengan kekuatan politik NU, sehingga NU yang telah mendapatkan kedudukan dalam politik sebelumnya tidak boleh melepaskan posisinya dalam pemerintahan.

Sementara itu Masyumi melihat bahwa permasalahannya tidak terletak pada ikut atau tidaknya dalam pemerintahan tetapi, Masyumi berpandangan bahwa Demokrasi Terpimpin akan membawa kehancuran

²⁷ Muhammad Rijal Fadli, “Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin : Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang”, *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 1 2020, hlm. 38.

²⁸ *Ibid.*

bagi bangsa Indonesia karena bukan representasi dari demokrasi dan justru merupakan bentuk lain dari otoriterisme²⁹. Tokoh-tokoh pemimpin Masyumi mengeluarkan tulisan-tulisan yang menyeru persatuan umat Islam dalam rangka menghadapi kembalinya konstitusi UUD 1945 dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dinilai sepihak dalam mengartikan konstitusi³⁰.

Partai Masyumi memiliki pandangan bahwa demokrasi bukan hanya semata-mata cara yang dapat diubah setiap waktu menurut keadaan, demokrasi itu sebagai jalan atau pandangan hidup. Dualisme partai Islam semakin besar ketika Masyumi menentang kebijakan Presiden Soekarno dalam membentuk Kabinet Kerja I, yang sebab menurut Masyumi pembentukan kabinet tersebut bukan berdasar pada demokrasi yang sesungguhnya. Masyumi juga mengumumkan larangan bagi seluruh anggotanya untuk berpartisipasi dalam kabinet, dan kemudian memecat Muhammad Noer yang ditunjuk menjadi menteri Pekerjaan Umum, ada pula Muljadi Djojomartono yang memilih mengundurkan diri dari Masyumi untuk menjadi menteri Sosial³¹.

PSII, dan Perti memilih untuk tidak memberikan tanggapan apapun dan menunggu hasil dari pemerintahan Soekarno tanpa melarang anggotanya untuk berpartisipasi dalam politik pemerintahan³². Pandangan

²⁹ Sukiman, "Ummat Islam Harus Bersatu untuk Menghadapi Kembalinya ke UUD 1945", *Harian Abadi*, 3 April 1959

³⁰ *Ibid.*

³¹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm, 346.

³² *Ibid.*

partai terhadap Demokrasi Terpimpin memberikan dampak secara langsung, di mana pada penyusunan kabinet pertama Masyumi tidak diikutsertakan. Perbedaan pandangan antara partai-partai Islam yang meliputi Masyumi, NU, PSII, dan Perti tak menjadi suatu konflik ke-empat partai tersebut tetaplah perwakilan dari umat Islam dalam politik. Meskipun NU, PSII, dan PERTI mendukung pemerintahan Soekarno namun mereka tidak setuju dengan intervensi Soekarno terhadap susunan ketatanegaraan yang merupakan kewenangan dari Konstitusi³³. Alasan pendukungan PERTI sendiri merupakan sebuah pengaruh dari kharisma Soekarno, dan PSII menganggap hubungan Soekarno dengan keluarga Tjokroaminto merupakan sebuah ikatan yang harus dijaga, sementara NU menilai kebijakan Soekarno mengubah sistem pemerintahan atau sistem demokrasi merupakan sebuah bentuk dari *Hijrah* dan Manipol-Usdek-nya sebagai bentuk *Ijtihad* Soekarno untuk mencapai revolusi³⁴.

Gambar 1.6
K.H. Wahab Chasbullah (NU) menyambut Presiden Soekarno pada Mukhtamar NU Ke-23 tahun 1963



Sumber : NuOnline <https://jatim.nu.or.id/ampa/opini/>

³³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 37.

³⁴ Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, hlm. 361.

2. Partai Komunis Indonesia

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin mengusung konsep-konsep demokrasi Timur dengan ideologi Sosialisme. Konsep demokrasi yang digunakan Soekarno untuk memimpin pemerintahan memungkinkan bagi partai yang bukan pemenang pemilu untuk bergabung dalam pemerintahan. PKI yang dipimpin oleh D.N Aidit mengambil posisi sebagai fraksi nasionalis dan mendukung wacana pemerintahan Demokrasi Terpimpin Soekarno yang menentang konsep demokrasi Barat pada sistem pemerintahan Parlementer³⁵. Dengan demikian PKI makin disukai oleh Soekarno untuk mewujudkan revolusi nasional dalam Demokrasi Terpimpin.

Dalam masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin terdapat empat besar kekuatan partai seperti NU, Masyumi, PNI dan PKI yang mengisi parlemen. Tapi pada kenyataannya Soekarno lebih memilih Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikarenakan politik Soekarno lebih cenderung ke negara sosialis yang mana dibuktikan dengan poros Jakarta-Peking dan Jakarta Hanoi³⁶. PKI diberikan tempat oleh Soekarno dalam sistem perpolitikan nasional, menurut Soekarno PKI telah terbukti mempunyai basis masa terbesar di Indonesia daripada partai-partai lain³⁷. Kemudian pada pembentukan kabinet tahun 1962 dua tokoh PKI yaitu D.N Aidit dan

³⁵ Rex Mortimer, *Indonesia Communism Under Soekarno (Ideologi dan Politik 1959-1965)*, (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), hlm. 6.

³⁶ *Ibid*, hlm. 23.

³⁷ Arin Kusumaningrum, 2019, *Masa Demokrasi Terpimpin,...*, hlm. 56.

Njoto diangkat Soekarno menjadi Menteri Penasihat. Tak hanya sebatas mengangkat pemimpin PKI sebagai Menteri, Soekarno juga menerbitkan slogan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang tujuannya sebagai sambutan terhadap PKI karena telah masuk dalam pemerintahan. Peranan PKI sebagai mitra politik Soekarno dalam rencana pemerintahan Demokrasi Terpimpin tercermin dalam slogan Nasakom dan PKI melihatnya secara positif sebagai sebuah pergerakan bersatu yang multi-kelas dan multi-golongan³⁸.

Respon positif yang ditunjukkan PKI terhadap konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno membawanya pada puncak kejayaan politik sebab karenanya berhasil bergabung dalam pemerintahan. Pergelaran politik Demokrasi Terpimpin Soekarno memperbesar peran PKI dalam tubuh pemerintahan sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan Soekarno. PKI terus-menerus mengkampanyekan keberpihakannya terhadap pemerintahan Soekarno, D.N. Aidit sebagai ketua umum PKI menjadi tokoh sentral dalam propaganda dukungannya terhadap pemerintahan. Aidit dalam pidatonya pada peringatan hari jadi PKI ke-44 di Semarang menyebutkan, “adanya gagasan Nasakom adalah bukti betapa suburnya Indonesia untuk perkembangan Marxisme”³⁹. Aidit juga menyindir golongan yang melakukan penolakan terhadap pemerintahan dengan menyebutkan bahwa, “sifat Komunis yang materialisme itulah yang

³⁸ Rex Mortimer, 2006, *Indonesia Communism Under Soekarno...*, hlm. 32.

³⁹ No name, “D.N. Aidit pada ulangtahun Ke-44 PKI di Semarang : Adanja Nasakom adalah bukti betapa suburnja Indonesia untuk perkembangan Marxisme”, *Harian Rakjat*, 30 Mei 1964, hlm. 3.

menjadikannya dapat menerima Pancasila dengan yakin dan sepenuh hati. Sebaliknya, Masyumi yang bersifat idealis tidak dapat menerima Pancasila”, Aidit juga menambahkan anti-Komunis berarti anti-Republik dan anti-Soekarno⁴⁰.

Propaganda yang dilakukan oleh petinggi partai PKI menjadikan adanya hubungan dekat antara PKI dengan pemerintah serta dapat berkembang menjadi partai yang besar mencapai 3 juta orang anggota pada tahun 1965⁴¹. PKI kemudian mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi masa seperti, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)⁴².

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Herbert Feith, 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, ..., hlm. 412.

⁴² Abi Sholehuddin, “Jargon Politik Demokrasi Terpimpin”, *Jurnal Avatara*, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 73.

BAB IV
KONFLIK POLITIK PARTA-PARTAI ISLAM DENGAN PKI TAHUN
1959-1965

A. Konflik Partai Masyumi Dengan Partai Komunis

Konflik politik antar Partai Masyumi dengan PKI dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologi dan kedudukan politik, yang menimbulkan persaingan kedua partai tersebut untuk dapat mengalahkan satu sama lain¹. Dari pihak Masyumi kedudukan politik yang didapat tidak begitu menguntungkan sebab mereka kontra dengan sistem Demokrasi Terpimpin dan Nasakom yang telah dijadikan sebagai poros persatuan. Di sisi lain PKI sedang di atas angin dengan adanya Nasakom dan Revolusi Nasional Manipol-USDEK. Masyumi melakukan upaya-upaya untuk menentang keberadaan PKI dalam pemerintahan salah satunya dengan Liga Demokrasi. Masyumi menjadi pelopor organisasi ini yang mana tujuannya adalah untuk menolak pembubaran DPR dan pembentukan DPR-Gotong Royong dan melakukan propagan politik Anti-Komunis. Dalam pergerakan Liga Demokrasi ini Masyumi juga mendapat dukungan dari partai lain seperti IPKI, dan Parkindo juga memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh partai secara individu.

Selain dari Liga Demokrasi ini Mohammad Natsir merasa bahwa perjuangan partai Masyumi tidak lagi dapat berjalan kemudian bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan

¹ Muhammad Rijal Fadli, "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin : Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang", *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 1 2020, hlm. 35

Rakyat Semesta (Permesta)². Melalui PRRI inilah kemudian Natsir memberikan desakan-desakan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menuntut menghapus kedudukan politik PKI dalam pemerintahan³. Kembali pada usaha Masyumi menentang PKI melalui Liga Demokrasi, salah satu propaganda yang jelas disampaikan oleh organisasi ini adalah tentang yang layak menjadi pembantu pemerintahan itu adalah “Kaum pecinta agama, ketuhanan Yang Maha Esa dan Non-Komunis”⁴. Banyak kemudian propagan-propaganda politik Anti-Komunis tersebut disebarkan melalui media surat kabar baik dalam bentuk pidato ataupun jargon-jargon.

Pertentangan Masyumi terhadap PKI tidak dapat dilakukan di dalam Parlemen sebab saat itu Kabinet maupun DPR tengah dilakukan *Retooling*. Di mana Masyumi menjadi tersingkirkan sebab berbeda pendapat dengan sistem dan ideologi politik Presiden Soekarno. Upaya Masyumi melalui Liga Demokrasi tersebut kemudian memicu reaksi-reaksi dari PKI. Reaksi yang frontal terjadi pada rapat Liga Demokrasi oleh sekelompok orang yang membawa poster provokatif bertuliskan “Liga Demokrasi Anti Presiden dan DPR-GR”⁵. PKI menggunakan senjata ampuh dengan menuding balik jika yang anti-Komunis adalah sama dengan anti-Presiden dan pemerintahan. Gejolak-gejolak seperti ini terus-menerus terjadi hingga kemudian Presiden Soekarno pulang dari lawatannya di Luar Negeri. Masyumi dibubarkan dengan Keppres

² Lukman Hakiem, *Dari Panggung Sejarah Bangsa : Belajar dari Tokoh dan Peristiwa*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 173.

³ *Ibid*, hlm. 174.

⁴ No Name, “DPR-GR Bukan Tempat Perdjoangan Islam”, 4 Juni 1960, hlm. 1.

⁵ Dahlan Ibrahim, “Bohong besar Liga Demokrasi dikatakan anti Presiden Soekarno, Kenyataan sekarang tidak bertambah dekat dengan tudjuan”, *Obor Rakyat*, 16 Mei 1960, hlm. 1

No. 200 Tahun 1960⁶ setelah terbukti melanggar Penpres No. 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Partai. Dengan demikian PKI memenangkan konflik atas Masyumi dan melanjutkan mobilitasnya dalam Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

B. Konflik Dalam Parlemen Antara NU dengan PKI

Pasca dibubarkannya Partai Masyumi oleh Keppres No. 200 Tahun 1960 kemudian yang tersisa dari kekuatan politik Islam adalah NU, PSII, dan Perti. Dari ketiganya NU adalah partai yang memiliki kekuatan politik terbesar dari dua lainnya dalam Kabinet ataupun Parlemen. Mengutip dari buku memoar K.H Saifuddin Zuhri pertentangan pandangan politik NU tetap terjadi, yang mana kemudian *Rais 'Aam* NU, K.H.A Wahab Hasbullah menyatakan, “Bung Karno kelewat gandrung persatuan hingga termakan oleh ambisinya mempersatukan partai-partai yang sejak semula mempunyai unsur-unsur yang berbeda, yang mustahil bisa dipersatukan. Bagaimana politik NASAKOM hendak diwujudkan padahal secara prinsipil nasionalisme bertentangan dengan Komunisme, apalagi antar agama (terutama Islam) dengan Komunisme yang tidak mungkin bisa dipersatukan”⁷. Namun, kendati demikian politik NU cenderung menghindari konflik langsung dengan Presiden hal ini terlihat dari pernyataan K.H Masykur dalam rapat PBNU yang membahas situasi politik awal Demokrasi Terpimpin, “Yang Penting Bagaimana agar kita tidak melakukan

⁶ ANRI. Arsip Statis Sekretariat Negara : Produk Hukum 1949 – 1960. Keputusan Presiden 1950-1960. Nomor Arsip 6407. Ketetapan Presiden Republik Indonesia No. 200 Tahun 1960 Pembubaran Partai Masyumi.

⁷ K.H. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam Kemnterian Agama RI, 2020), hlm 567.

politik konfrontatif dengan Bung Karno yang sekarang berbeda dan bertentangan dengan PNI, Masyumi, dan NU”⁸.

Selaras dengan pernyataan dari Ulama NU tersebut, ketika Presiden Soekarno tetap pada kebijakannya tentang Demokrasi Terpimpin dan Nasakom para tokoh politik NU seperti K.H Idham Khalid dan K.H Saifuddin Zuhri menyatakan terbuka dengan Demokrasi Terpimpin dan menerima Nasakom. Penerimaan tersebut dengan menyampaikan dasar-dasar sebagai berikutPertama, pernyataan yang disampaikan oleh K.H Idham Khalid pada Kongres NU Ke-22 Tahun 1959. “NU menyatakan sikap akomodatif (penyesuaian) terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap masih sesuai dengan nilai-nilai Islam selama terdapat dua unsur yang saling melengkapi yaitu, unsur musyawarah yang menghargai pimpinan, dan unsur pimpinan yang menghargai musyawarah”⁹. Kedua, K.H Saifuddin dalam suatu kesempatan di hadapan para kader NU mengatakan perihal dasar penerimaan NU terhadap Nasakom, “Apa yang tidak dapat diraih seluruhnya, sebagian yang dapat diraih jangan dilepaskan”¹⁰. Dasar tersebut merupakan salah satu dari Kaidah dalam *Ushul Fiqh* yang dapat digunakan dalam segala aspek *Fiqh* termasuk politik sebagaimana yang dilakukan oleh K.H Saifuddin Zuhri di atas.

Keadaan yang membuat setiap pihak kontra dengan pemerintah akan disingkirkan NU memilih untuk tetap menjadi bagian dari pemerintahan

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Rijal Fadli, “Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin : Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang”, *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 1 2020, hlm. 38.

¹⁰ *Ibid.*

berdampingan dengan Nasakom adalah untuk menjadi penyeimbang kekuatan politik agar suara untuk umat Islam tetap ada dalam pemerintahan¹¹. Dengan politik NU yang akomodatif tersebut, menjadikan NU menjadi satu-satunya kekuatan politik Islam terbesar, mengingat dua partai Islam lainnya PSII dan Perti yang merupakan partai kecil dan tidak memiliki kedudukan politik seperti NU. Fungsi NU sebagai penyeimbang kekuatan politik ini dimaksudkan terhadap kekuatan politik PKI dalam pemerintahan atau parlemen. Dapat dikatakan bahwa NU menjadi penghalau upaya-upaya PKI dalam hal pemikiran atau pun pendapat¹² yang ada dalam parlemen seperti Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), dan DPR-GR. Yang mana kedua lembaga parlemen tersebut merupakan dua titik tumpu pemerintahan dan perundang-undangan¹³. Secara tidak langsung terjadilah benturan antara NU yang menghalau PKI bergerak dengan bebas dan meluaskan pengaruhnya dalam parlemen dan pemerintahan.

1. Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Salah satu pertentangan antara NU dengan PKI terjadi dalam Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang ketika itu tengah membahas tentang Sosialisme Indonesia. PKI yang beraliran sosialis Marxis menyampaikan uraian sosialisme yang sarat dengan ideologi komunis. Oleh NU diimbangi dengan menghalau uraian yang disampaikan PKI tersebut dengan dasar-

¹¹ Fathoni, "Apa Pertimbangan NU Menerima Nasakom Soekarno?", NU Online, <https://www.nu.or.id/fragmen/apa-pertimbangan-nu-menerima-nasakom-soekarno-5BXqP>, diakses pada 8 Oktober 2023 pukul 21.15 WIB.

¹² *Ibid.*

¹³ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta : Pandji Masjarakat, 1960), hlm. 8.

dasar yang Islami sebagaimana yang disampaikan oleh K.H.A Wahab Hasbullah yang menjadi salah satu perwakilan ulama NU dalam DPAS, “.. Oleh karena itu sosialisme yang kita praktikan adalah Sosialisme Indonesia yang sesuai dengan adat istiadat bangsa kita, kebudayaan kita, maupun keyakinan agama kita”¹⁴.

Selain sebagai penyeimbang pemikiran sebagaimana di atas, NU juga menghalau serangan-serangan politik dari PKI terhadap Islam. Seperti yang dilakukan ketika PKI tengah gencar melakukan propaganda tentang Konfrontasi Malaysia dengan melakukan aksi-aksi agresif dan militan. Di mulai dengan berdemonstrasi di depan Istora Senayan melakukan aksi mengganyang ‘dendeng’ tikus, mengganyang setan desa, mengganyang setan kota, mengganyang musuh-musuh PKI. PKI berusaha menyudutkan Islam dengan menanyakan bagaimana hukum memakan tikus menurut Islam di hadapan rapat DPA tentunya pertanyaan tersebut disampaikan dengan muatan politik dan mendemonstrasikan rasa anti patinya terhadap Islam. Pertanyaan tersebut dijawab oleh K.H Saifuddin Zuhri, “Saudara ketua, tolong beritahukan kepada si penanya di sebelah kiriku ini bahwa aku sedang berjuang agar rakyat mampu makan ayam goreng. Karena itu jangan dibelokan untuk makan dagig tikus”¹⁵.

Pertanyaan dari PKI tersebut menyudutkan pihak Islam sebab pada saat itu PKI tengah melakukan serangkaian gerakan yang mendukung

¹⁴ K.H. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren...*, Hlm. 604.

¹⁵ *Ibid*, hlm 659-660

konfrontasi dengan Malaysia. PKI tahu betul jika dalam Islam memakan tikus adalah haram, sehingga tujuan PKI menanyakan tersebut adalah untuk membenturkan agama dengan gejolak politik yang sedang terjadi.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Selanjutnya pertentangan antar NU dengan PKI juga terjadi dalam DPR-GR di mana pada Komisi I yang tengah membahas tentang RUU Desa Pradja. Kubu PKI yang diwakili oleh Usman Muftiwidjaja menyatakan bahwa mencabut segala hukum feodal peninggalan kolonial. Dengan demikian hukum ketatadesaan yang masih mengandung unsur feodal dan kolonial harus diganti. Usulan dari perwakilan PKI ini kemudian disanggah oleh argumen K.H. Mahfud Syamsulhadi dari fraksi NU yang pada intinya menegaskan agar jabatan Mudin sebagai petugas desa agar diperjelas kedudukannya dengan tetap dimasukkan dalam petugas desa supaya unsur-unsur agama terjamin dalam kehidupan di desa¹⁶.

Selain itu hal serupa juga terjadi pada rapat DPR-GR yang membahas mengenai RUU Tentang Pengumpulan Uang atau barang. M.H Lukman yang merupakan wakil dari PKI sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua dari DPR-GR menyatakan, “Saya ingin bertanya, meskipun saya bukan kiai yaitu tentang pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama atau hukum adat, misalnya soal pengumpulan zakat fitrah apakah itu juga termasuk dalam undang-undang ini. Hal ini saya tanyakan karena ada

¹⁶ Arsip Dewan Perwakilan Rakyat RI, No. Leg-1-20190322-041317-8390, “Risalah Resmi Persidangan Ke-I Rapat Gabungan Kominis-1”, Senin 24 Tahun 1964, hlm. 19-21.

istilah ‘pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama’, jadi kalau disini dikatakan diluar ijin, padahal yang demikian itu bisa disalah gunakan”. Maksud M.H Lukman ini adalah meminta agar pengumpulan uang dan barang yang diwajibkannoleh hukum agama itu harus melalui ijin pemerintah. kemudian dijawab oleh Muljadi Djojomartono, “Zakat fitrah itu tidak termasuk soal pengumpulan uang dan barang yang harus mendapat ijin, tetapi harus lapor kepada yang berwajib”¹⁷.

Dari uraian-uraian diatas memperlihatkan bahwa, konflik yang terjadi antara NU dengan PKI bersifat diplomatik yang dilakukan melalui argumentasi politik dalam Parlemen. NU mengimbangi dari PKI dari segala aspek politik yang ada dalam Parlemen. Bahkan NU juga mengimbangi PKI dari aspek diluar politik sebagaimana yang dilakukan oleh Menteri Agama K.H Saifuddin Zuhri yang merintis pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN)¹⁸. Selain berfungsi dalam bidang pendidikan dan *Ukhuwah Islamiyah* Kiai Zuhri juga menyebutkan bahwa IAIN memiliki efek politik dengan mengimbangi kampanye PKI dengan ‘Universitas Rakyat’¹⁹. Segala upaya yang dilakukan oleh NU melalui sarana kedudukan politiknya dalam Kabinet ataupun Parlemen ditujukan untuk menghalangi, membatasi, atau setidak-tidaknya mengimbangi politik PKI.

C. Propaganda Politik Dalam Pers

Media Pers yang secara umumnya memiliki fungsi sebagai media informasi, lantas bagaimana jika kemudian digunakan untuk menyebarkan

¹⁷ Arsip Dewan Perwakilan Rakyat RI, No. leg_1-20190410-040423-3613, “Risalah Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong”, 6 April 1961, hlm. 31.

¹⁸ K.H. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren...*, Hlm hlm. 642

¹⁹ *Ibid*, hlm. 644

propaganda politik untuk melawan pihak yang berseberangan politiknya?. Partai-partai politik atau golongan-golongan politik pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin setidaknya memiliki satu atau lebih media Surat Kabar. Diantara surat-surat kabar tersebut adalah Harian Rakjat, Bintang Timur, Obor Rakjat, dan Duta Masyarakat. Harian Rakjat dan Bintang Timur merupakan Surat Kabar yang kebanyakan memuat tentang propaganda politik yang cenderung baraliran kiri. Obor Rakjat adalah Surat Kabar yang isinya cenderung kontra dengan PKI dan pemerintahan Soekarno, cenderung pada aliran politik Islam yang berada di Sumatera. Sementara itu NU memiliki Surat Kabar Duta Masjrakat yang digunakan untuk kepentingan menyebarkan gagasan-gagasan dan aspirasi tentang pemerintahan Demokrasi Terpimpin dari sudut pandang keislaman NU.

1. Surat Kabar Harian Rakyat dan Bintang Timur

Partai Komunis Indonesia memiliki media pers mereka sendiri yang digunakan sebagai sarana menyebarkan ajaran dan propaganda politiknya. Surat kabar Harian Rakjat sangat jarang sekali didapati sebagai koleksi dari lembaga-lembaga arsip. Di Monumen Pers Surakarta koleksi surat kabar ini hanya terbatas pada Juni tahun 1964 saja, sementara dalam *website* Khastara milik Perpustakaan Nasional Indonesia sama sekali tidak terdapat koleksi tentang surat kabar ini. Dengan keterbatasan sumber ini penulis telah dapat mengumpulkan setidaknya satu terbitan surat kabar Harian Rakjat yang memiliki muatan propaganda politik.

Harian Rakjat yang terbit pada 30 Mei 1964 terdapat dua judul berita, salah satu beritanya berjudul “DN. Aidit pada ulang tahun PKI ke-44 di Semarang : Adanya gagasan Nasakom adalah bukti nyata betapa subur nya Indonesia untuk perkembangan Marxisme”.

Gambar 2.1
Potongan Surat Kabar Harian Rakjat 30 Mei 1964



Sumber : Arsip Monumen Pers, Surakarta

Dalam narasi yang dituliskan terdapat satu propagan yang paling jitu digunakan oleh PKI yaitu, “Politik Anti-Komunis Berarti Anti-Republik Dan Anti-Soekarno”. Propaganda tersebut dimaksudkan untuk menjawab propaganda lawan politik PKI serta menunjukkan hubungan erat antara PKI dengan Presiden Soekarno. Masih pada surat kabar terbutan yang sama pada halaman ke-3 terdapat propaganda politik lain, “LUASKAN AKSI SEFIHAK : untuk menggantang setan² desa dan memenangkan Manipol”. PKI menyebarkan propaganda politik yang sifatnya provokatif untuk

mendapatkan simpati masyarakat. Ini menunjukkan fungsi dari surat kabar Harian Rakjat sebagai sarana menyebarkan propaganda politik.

Gambar 2.2
Potongan Surat Kabar Harian Rakjat 30 Mei 1964



Sumber : Arsip Monumen Pers, Surakarta

Propaganda politik yang tersirat pada penggalan surat kabar di atas merupakan bagian dari serangkaian aksi dalam kerangka Konfrontasi dengan Malaysia dan lawan-lawan politiknya. Di mulai dari mengganyang setan-setan desa, setan-setan kota, hingga kemudian mengganyang musuh-musuh PKI²⁰. Selain Harian Rakjat, PKI juga mempunyai Bintang Timur yang juga menjadi sarana PKI untuk menyebarkan propaganda politik mereka. Seperti tajuk berita yang menyebut lawan politik mereka sebagai ‘Kaum Kontra Revolusi’ yang terbit pada 15 Mei 1963. Dalam berita tersebut yang disebut sebagai ‘Kaum Kontra-Revolusi’ adalah para demonstran yang menentang pembentukan Kabinet Gotong Royong yang mana akan memasukkan PKI di dalamnya²¹. Padahal istilah ‘Kontra Revolusioner’ adalah istilah yang keluar

²⁰ K.H. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren...*, Hlm. 604.

²¹ No. Name, Bintang Timur, “Kaum Kontra Revolusi Meniup² Pertentangan”, 15 Mei 1963, Khasara, https://khasara.perpusnas.go.id?url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Bintang%20Timur_1963_05_15_001.pdf, hlm 1.

dari Soekarno untuk menyebut pemberontakan-pemberontakan bersenjata seperti PRRI dan Permesta²².

Gambar 2.3
Potongan gambar Surat Kabar Bintang Timur Terbitan 15 Mei 1963



Sumber : Khastara,

https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/299272?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Bintang%20Timur_1963_05_15_001.pdf

Tajuk berita di atas menunjukkan upaya pembangunan opini terhadap pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah disebut sebagai ‘Kaum Kontra Revolusi. Pembentukan opini ini dimanfaatkan juga dalam rangkian propaganda politik yang menunjukkan bahwa sifat materialistis PKI adalah benar dan sifat yang Rasialis adalah salah²³. Sebagaimana yang tertulis dalam tajuk berita, “PANDANGAN RASIALIS TAK PERNAH BENAR : INDOKTRINASI JANG SALAH MEMBAWA AKIBAT TINDAKAN JANG SALAH” terbitan 6 Juni 1963. Berita tersebut

²² K.H. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren...*, Hlm. 638.

²³ No. Name, Bintang Timur, “PANDANGAN RASIALIS TAK PERNAH BENAR : INDOKTRINASI JANG SALAH MEMBAWA AKIBAT TINDAKAN JANG SALAH”, 6 Juni 1963, https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/299272?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Bintang%20Timur_1963_06_06_001.pdf, hlm. 1.

menarasikan tentang tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh Pelajar dan Mahasiswa di Jakarta perihal penolakan Kabinet Gotong Royong. Para mahasiswa dan pelajar yang melakukan demonstrasi dicap sebagai akibat dari indoktrinasi kaum Rasialis yang Kontra-Revolusi. Kemudian juga menarasikan bahwa pandangan Materialis seperti PKI yang mau mendukung Nasakom, Manipol-USDEK dan Pancasila.

Gambar 2.4
Potongan gambar Surat Kabar Bintang Timur 6 Juni 1963



Sumber : Khastara,

https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/299272?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/upload_ed_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Bintang%20Timur_1963_06_06_001.pdf

Surat kabar ‘Harian Rakjat’ dan ‘Bintang Timur’ keduanya sama-sama menjadi sarana penyebaran propaganda politik PKI untuk melakukan perlawanan terhadap musuh-musuh politiknya. Sebagian narasi yang terdapat dalam berita-berita sebagaimana yang dikutip di atas dapat memperlihatkan upaya-upaya PKI untuk menyebarkan gagasan-gagasan ideologi mereka.

2. Surat Kabar Obor Rakjat

Obor Rakjat adalah surat kabar yang kantor beritanya berada di Palembang, Sumatera Selatan yang terbit setiap minggu dan terakhir terbit pada Desember 1960. Obor Rakjat menjadi salah satu media pers yang beraliran politik senantias menyebarkan berita-berita tentang pihak Oposisi seperti Masyumi dan Liga Demokrasi. Pada tahun 1960 ketika terbentuknya Liga Demokrasi surat kabar ini menunjukkan keberpihakannya terhadap para Oposisi yang ketika itu menentang pembentukan DPR-GR dan keikutsertaan PKI di dalamnya. Salah satu tajuk berita yang terbit pada 4 Juni 1960 bertuliskan “DPR-GR bukan tempat perjuangan Islam”

Gambar 2.5
Penggalian Surat Kabar Obor Rakjat
“DPR-GR bukan tempat perjuangan Islam”



Sumber : Arsip Monumen Pers, Surakarta.

Berita di atas adalah kutipan dari M. Ali Tojib salah seorang anggota DPR tahun 1955 dari Partai PSII. Di dalam berita tersebut dijelaskan bahwa

M. Ali Tojib memberikan kritiknya terhadap PSII yang melarang anggota-anggotanya untuk bergabung dengan Liga Demokrasi. Tajuk berita yang provokatif secara *to the point* memilih kalimat “DPR-GR bukan tempat perjuangan Islam” telah memberikan kesan propaganda politik. Selain itu terdapat perkataan dari M. Ali Tojib yang dimuat dalam berita itu juga menyatakan jika yang seharusnya duduk dalam parlemen adalah pihak Non-Komunis. Dengan demikian menambahkan kesan propaganda politik yang cukup terang sebagai pihak pendukung oposisi yang anti PKI.

Propaganda politik ant PKI ini juga terdapat pada salah satu tajuk berita lain yang terbit pada 2 September 1960 “IPKI meminta supaya : PKI DIKUBURKAN SADJA. PKI serdadu gadjian negara Asing”. Kalimat “PKI DIKUBURKAN SADJA” ditulis dengan huruf kapital dan diperbesar daripada kalimat yang sebagaimana gambar di bawah ini, :

Gambar 2.6
Pengalan Surat Kabar Obor Rakjat
“IPKI meminta supaya : PKI DIKUBURKAN SADJA.
PKI serdadu gadjian negara Asing”



Sumber : Arsip Monumen Pers, Surakarta

Obor Rakjat memberitakan tentang pernyataan IPKI yang mendukung larangan kegiatan politik selama masa darurat perang dari Pendam IV Sriwijaya. IPKI dalam pernyataan menambah-nambahkan pernyataan yang menuduh PKI sebagai ‘Serdadu Gajian Negar Asing’ sedangkan konteks larangan kegiatan politik tersebut diterbitkan terkait adanya konflik di Irian Barat. Obor Rakjat menyoroti kalimat “PKI DIKUBURKAN SADJA” yang bahkan oleh IPKI dalam pernyataanya tidak mengatakan dengan kalimat “DIKUBURKAN”. Propaganda politik anti-Komunis atau PKI yang dilakukan oleh Obor Rakjat ini dilakukan dengan memberitakan setiap pergerakan dari Oposisi yang kemudian memakai diksi-diksi yang bersifat konfrontatif.

Gambar 2.7
Potongan Surat Kabar Obor Rakjat
“Liga Demokrasi, suatu manifestasi jg spontaan!
Sumatera Selatan bukan Kominis”.



Sumber : Arsip, Monumen Pers, Surakarta

Salah satu proganda politik anti-Komunis lainnya adalah yang terbit pada 17 Mei 1960 “Liga Demokrasi, suatu manifestasi jg spontan! Sumatera Selatan bukan Kominis”²⁴. Kalimat yang konfrontatif dapat terlihat dari yang menyatakan ‘Sumatera Selatan Bukan Kominis’ secara jelas menentang keberadaan partai PKI di Sumatera Selatan.

Propaganda politik yang dilakukan oleh Surat Kabar Obor Rakjat ini mulai mereda sejak adanya aturan mengenai Pers. Sebagaiman yang juga diberitakan oleh Obor Rakjat sendiri pada 30 Desember 1960 dalam tajuk “Menpen Maladi : Hanja pers jang mendukung Manipol diizinkan terbit”, memperlihatkan sedikit kehati-hatian mereka seolah mendesak agar pimpinan politik mereka tak bernasib sama seperti Masyumi yang dibubarkan. Hal ini penulis simpulkan sebab dalam tajuk bacaan tersebut tidak ada narasi konfrontatif terhadap pemerintah sebagaimana yang biasanya dituliskan oleh Obor Rakjat.

Gambar 2.8
Tajuk Berita Tentang Pers dan Manipol
dalam Surat Kabar Obor Rakjat terbitan 30 Desember 1960



Sumber : Arsip Monumen Pers

²⁴ No Name, Obor Rakjat, “Liga Demokrasi, suatu manifestasi jg spontan! Sumatera Selatan bukan Kominis”, 17 Mei 1960, hlm. 1.

Narasi yang dituliskan dalam tajuk berita tersebut sekedar mengutip perkataan Menteri Penerangan R. Maladi dalam pertemuannya dengan perwakilan wartawan dari Persatuan Wartawan Indonesia di Bandung²⁵. Menurut isi berita yang dituliskan bahwa Pemerintah akan mencabut ijin media-media pers yang tidak mendukung Manipol-USDEK dan akan memberikan bantuan kepada siapa saja yang mendukung Manipol-USDEK. Selain itu Menpen Maladi juga menyatakan bahwa boleh mengkritik pemerintah asal bersifat konstruktif. Narasi yang ditunjukkan dalam penulisan ini boleh jadi suatu isyarat dari Obor Rakjat untuk berpamitan dengan para pembacanya.

3. Surat Kabar Duta Masyarakat

Duta Masyarakat adalah surat kabar yang redaksinya dibawah kepemimpinan Kiai-Kiai NU²⁶. Surat kabar ini menjadi 'terompet' untuk menyebarkan gagasan-gagasan keislaman NU yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk Politik²⁷. Sebagaimana dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa tujuan politik NU adalah untuk mempertahankan suara Umat Islam dalam pemerintahan dan untuk mengimbangi kekuatan politik PKI terhadap pemerintahan. Jika PKI memanfaatkan media persnya untuk menyebarkan propaganda politik yang sifatnya konfrontatif terhadap lawan politiknya maka NU dengan Duta Masyarakatnya ini tidak serupa dengan itu. Duta Masyarakat lebih banyak

²⁵ No Name, Obor Rakjat, "Menpen Maladi : Hanja pers jang mendukung Manipol diizinkan terbit", 30 Desember 1960, hlm. 2.

²⁶ K.H. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren...*, Hlm. 671.

²⁷ *Ibid.*

berisikan tentang gagasan-gagasan politik Islam, melaksanakan Revolusi Nasional dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keagamaan.

Gambar 2.9
Potongan Gambar Surat Kabar Duta Masyarakat 2 Juli 1963



Sumber : Khastara.co.id

Tajuk berita yang bertuliskan, “Djadilah Wakil Revolusi Indonesia Jang Bernafaskan Keagamaan Itu!” terbitan 2 Juli 1963. Duta Masyarakat menjadikan kata “Jang Bernafaskan Keagamaan” adalah bentuk penegasan bahwa NU meskipun menerima Nasakom dan Manipol tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman.

Duta Masyarakat juga melakukan upaya untuk mempersatukan kekuatan politik kubu Islam. Sebagai dalam tajuk berita yang bertuliskan, “Pernyataan bersama Partai² Islam & Ormas² Islam : Setiap Rongrongan Thd. Segolongan Ummat Islam Berarti Pengrongrongan Terhadap Ummat Islam Seluruhnya” terbitan, 17 Maret 1965. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh

NU, PSII, Muhammadiyah, Djamiyatul Washlijah, dan GASBIINDO. Konteks daripada pemberitaan Pernyataan Bersama ini adalah untuk menyebarkan *Ukhuwah Islamiyah* partai-partai dan ormas Islam dalam rang memenangkan Revolusi dan memperkokoh persatuan Nasional. Hal ini merupakan bentuk propaganda politik untuk mengimbangi PKI yang juga gencar melakukan propaganda dengan kata-kata ‘memenangkan Manipol’.

Gambar 3.1
Potongan Gambar Surat Kabar Duta Masyarakat 17 Maret 1965



Sumber : Khastara.co.id

Duta Masyarakat juga digunakan sebagai alat untuk menampis tuduhan-tuduhan terhadap kaum agama sebagai anti-Nasakom. Dalam suatu pemberitaan berjudul “Menteri Agama : Jang Sedang Galang adalah Nasakom” terbitan 2 Juni 1965 yang menyebarkan tentang kubu Islam bukanlah anti dengan Nasakom tetapi sedang melakukan pembiasaan dengan Nasakom. Dengan demikian Duta Masyarakat tengah menyebarkan pembangunan *Imej* atau muka kubu Islam yang menunjukkan bahwa Islam dapat bekerjasama dan Persatuan Nasional tersebut. Dengan mengutip pernyataan dari Menteri Agama K.H Saifudin Zuhri yang memberikan bekal

terhadap para Karyawan Kementerian Agama untuk pelatihan kader Nasakom yang akan dilakukan oleh Front Nasional²⁸.

Gambar 3.2
Potongan Gambar Surat Kabar Duta Masyarakat 2 Juni 1965



Sumber : Khastara.co.id

Berdasar uraian di atas media pers memiliki peranan yang cukup vital yaitu menjadi corong masing-masing kubu untuk menyebarkan gagasan-gagasan politiknya. Surat kabar pada situasi politik yang sedang bergejolak memperlihatkan adanya perubahan fungsi yang menjadikannya sebagai alat untuk menyebarkan propaganda politik baik yang sifatnya konfrontatif atau yang bersifat konstruktif sebagaimana Duta Masyarakat. Dengan adanya media-media pers menambah tensi konflik politik yang tengah terjadi dan memberikan dampak perluasan konflik politik.

²⁸ No. Name, Duta Masyarakat, "Menteri Agama : Jang Sedang Galang adalah Nasakom", 2 Juni 1965, hlm 1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar fokus penelitian, paparan data, dan temuan penelitian maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, :

Sistem Demokrasi Parlementer yang dianggap Soekarno tak sesuai jika diterapkan di Indonesia, oleh karena itu Soekarno berkehendak untuk membawa masyarakat Indonesia kepada demokrasi sesungguhnya, yaitu demokrasi gotong royong. Manifesto Politik Indonesia USDEK (UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Bangsa) dan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) merupakan dua konsepsi utama dan kebijakan dalam Demokrasi Terpimpin. Untuk memperlancar jalannya konsepsi tersebut Soekarno merancang dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berwenang sebagai formatur lembaga-lembaga negara. Soekarno membentuk sendiri, kabinet, susunan anggota DPR dan DPA, serta mengeluarkan undang-undang berupa Penpres dan Keppres.

Kebijakan Nasakom dan Manipol USDEK menjadi penyebab terjadinya konflik politik yang terjadi antara kubu partai Islam yang meliputi Masyumi, NU, PSII, dan Perti dengan kubu PKI. Masyumi yang melakukan konflik konfrontatif dengan terang menolak adanya PKI dalam pemerintahan tumbang pada 1960 setelah dibubarkan oleh Keppres No. 200 Tahun 1960. Sementara NU memilih perjuangan dengan jalan menerima Nasakom dan

Manipol, dari kubu NU berusaha mengimbangi kekuatan politik PKI dalam Parlemen ataupun Kabinet. Sementara PSII dan Perti yang merupakan partai kecil tidak banyak memberikan pengaruhnya. Konflik politik semakin diperkeruh dengan terlibatnya media pers yang digunakan sebagai sarana menyebarkan gagasan dan propaganda politik baik dari kubu Partai-partai Islam ataupun PKI.

B. Saran

1. Bagi para peminat sejarah Islam di Indonesia khususnya dalam bidang partai politik Islam dan organisasi Islam perlu mendalami sikap berpolitik yang berdasarkan agama namun juga fleksibel dalam artian boleh saja kontra dengan suatu konsepsi ataupun pemerintahan namun juga harus mempertimbangkan cara-cara yang efektif dalam memperjuangkannya dan menghindari tindakan yang ekstrem ataupun 'radikal'. Hal ini perlu dilakukan mengingat perjuangan partai politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin yang dapat dibilang keras menentang kebijakan politik Soekarno namun gagal dan edikitpun tidak menghasilkan dampak yang besar pada saat itu.
2. Bagi peneliti selanjutnya terkhusus yang meneliti tentang konflik politik antar partai-partai Islam dengan PKI, diharapkan tidak hanya terbatas pada konflik politik saja tetapi dapat lebih luas dalam bidang lain seperti , Hak Asai Manusia, Ideologi Islam, ataupun Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

ANRI. Arsip Statis Sekretariat Negara : Produk Hukum 1949 – 1960. Keputusan Presiden 1950-1960. Nomor Arsip 6407. Ketetapan Presiden Republik Indonesia No. 200 Tahun 1960 Pembubaran Partai Masyumi.

Arsip Dewan Perwakilan Rakyat RI, No. Leg-1-20190322-041317-8390, “Risalah Resmi Persidangan Ke-I Rapat Gabungan Kominis-1”, Senin 24 Tahun 1964.

Arsip Dewan Perwakilan Rakyat RI, No. Leg-1-20190410-040423-3613, “Risalah Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong”, 6 April 1961.

Peraturan/Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang 1945. Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75 Yang Telah Dicitak Ulang. Diunduh pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia(BPKRI).<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detailis/96516/keppres-no/150/tahun-1959>.

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia No. 7 Pasal 135 Tahun 1950. Lembaran Negara Nomor 1950-56. Diunduh pada <https://peraturan.bpk.id/Home/Details/38102/uu-no-7-tahun-1950>

Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Partai, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Yang Telah Dicitak Ulang, LN No. 1959/149, TLN No. 1916. Diunduh pada <https://www.bphn.go.id/data/documents/59pnp007.pdf>

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1960 Tentang Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaran Negara No. 24 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1954. <https://jdih.go.id/files/4/1960pr003.pdf>

Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Lembaran Negara No. 78 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2015. Diunduh pada <https://www.bphn.go.id/data/documents/60pnp004.pdf>

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Lembaran Negara No. 1963/101, Tambahan Lembaran

Negara No. 2595, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Diunduh pada <https://www.bphn.go.id/data/documents/63ppo11>

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia No. 7 Tahun 1960 Tentang Kegiatan-kegiatan Politik Selama Dalam Keadaan Bahaya, Lembaran Negara No. 108 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2047. Diunduh pada <https://jdih.go.id/files/4/1960ppt007.pdf>

Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia No. 8 Tahun 1960 tentang “larangan adanya organisasi-organisasi partai politik Islam, Indonesia “Masyumi”, “partai Kristen Indonesia (PARKINDO)”, “Partai Sosialis Indonesia (P.S.I)”, dan “Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I)” di daerah-daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan, serta Sulawesi Utara dan Tengah”, Lembaran Negara No. 113 Tahun 1960 yang telah dicetak ulang. Diunduh pada <https://jdih.go.id/files/4/1960ppt008.pdf>

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia No. 8 Tahun 1961 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Lembaran Negara No. 34 Tambahan Lembaran Negara No. 2459. <https://jdih.go.id/files/4/1962ppt009.pdf>

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 Tahun 1961 tentang Amnesti dan Abolisi, Lembaran Negara No. 272. Diunduh pada <https://www.bphn.go.id/data/documents/61kp449.pdf>

Keputusan Presiden No. 104 Tahun 1966”, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Sekretariat Kabinet RI. Diunduh pada <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/14931/kp1041966.pdf>

Buku

Abbas, S.R.S. 2021. *Kamus Peribahasa*. Bandung : Angkasa.

Adams, Cindy. 1984. *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.

Alwi, Habib. 2016. *Pengantar Studi Konflik Sosial : Sebuah Tinjauan Teoritis*. Nusa Tenggara Barat : IAIN Mataram.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Buyung Nasution, Adnan. 2009. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta : Pustaka Utama Pelajar.
- Departemen Penerangan R.I, *Pertjajalah Pada Benarnja Nasakom : Amanat-Indoktrinasi Presiden Soekarno Pada Pembukaan Kursus Kilat Kader Nasakom*, (Jakarta : Penerbitan Khusus, 1965), diunduh pada <https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/48420>)
- Departemen Penerangan RI. 1960. *Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia*. Perpustakaan Fakultas Sastra UI. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20393021>.
- Faulks, Keith. 2015. *Sosiologi Politik : Pengantar Kritis*. Diterjemahkan oleh Hemi Mahadi dan Shohifullah. Bandung : Nusa Media.
- Feith, Herbert. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta : LP3ES.
- Ghanoe, Muhammad. 2020. *Dunia Batin BUYA HAMKA : Kisah dan Catatan-catatan dari Balik Penjara*. Yogyakarta : Araska.
- Hakim, Lukman. 2008. *M. Natsir Di Panggung Sejarah Republik*. Jakarta Selatan : Republika.
- Hakim, Lukman. 2020. *Dari Panggung Sejarah Bangsa : Belajar dari Tokoh dan Peristiwa*. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar.
- Hamka. 1970. *Tasawuf Modern*. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Hanafi, Haniah, dan Suryani. 2011. *Politik Indonesia*. Ciputat : UIN Syarif Hidayatullah.
- Hatta, Mohammad. 1960. *Demokrasi Kita*. Jakarta : Pandji Masjarakat.
- Kusumaningrum, Arin. 2019. *Awal Orde Baru*. Singkawang : PT. Maraga Borneo Sarigas.
- Kusumaningrum, Arin. 2019. *Masa Demokrasi Terpimpin*. Kalimantan Barat : PT. Maraga Borneo Sarigas.
- Lubis, M. Ridwan. 2020. *Soekarno dan Islam : Dialog Pemikiran Modernisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta : UMY Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani.
- Mansyur Amin, Muhammad. 1996. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Jakarta: Al-Amin.

- Mortimer, Rex. 2006. *Indonesia Communism Under Soekarno (Idiologi dan Politik 1959-1965)*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT Leutika Nouvalitera.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pujosantoso, Sudarwanto. 2018. *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*. Pontianak : Derwati Press.
- Ricklefs, M.C. 2008. *A History of Modern Indonesia Since C. 1200*. New York : Palgrave Macmillan.
- Ricklef, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Serambi*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.
- Salam, Solihin. 1984. *Bung Karno Putra Fajar*. Jakarta : Gunung Agung.
- Salim, Agus. 2009. *Tragedi Fajar : Perseteruan Tentara-PKI dan Peristiwa G30S*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Siregar, M.R. 1995. *Tragedi Manusia dan Kemanusiaan : Kasus Indonesia Sebuah Holokaus Yang Diterima Sesudah Perang Dunia Kedua*. Jakarta : Gema Insani.
- Soekarno. 2019. *Bung Karno, Nawaksara, dan G30S*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Soekarno. 2016. *Di bawah Bendera Revolusi*. Jakarta : Banana Books.
- Soyomukti, Nurani. 2012. *Soekarno Otoriter?*. Yogyakarta: Garasi House of Book.
- Yatim, Badri. 1985. *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*. Jakarta : Inti Aksara.
- Zuhri, K.H. Saifuddin. *Berangkat Dari Pesantren*, Jakarta : Ditjen Bimas Islam Kemnterian Agama RI, 2020.

Surat Kabar

- Ibrahim, Dahlan. “Bohong besar Liga Demokrasi dikatakan anti Presiden Soekarno, Kenjataan seakrang tidak bertambah dekat dengan tudjuan”. *Obor Rakyat*. 16 Mei 1960.

- No Name. "Djika Parlemen dpt. Diganti dg. DPR-GR..." Bukan tidak mungkin DPR 2 Tk. I dan Tk. II akan diganti 'orang' dgn. DPR-GR djuga". *Obor Rakyat*. 10 Mei 1960.
- No name. "D.N. Aidit pada ulangtahun Ke-44 PKI di Semarang : Adanja Nasakom adalah bukti betapa suburnja Indonesia untuk perkembangan Marxisme". *Harian Rakjat*. 30 Mei 1964.
- No Name. "DPR-GR Bukan Tempat Perdjoangan Islam". *Obor Rakyat*. 4 Juni 1960.
- No Name. "IPKI meminta Supaja : PKI DIKUBURKAN SADJA, PKI serdadu gadjian asing. *Obor Rakjat*. 2 September 1960.
- No Name. "Kembali ke UUD 45 Merupakan Pukulan Telak Bagi Kaum Pemberontak". *Perdamaian*. 14 Agustus 1959.
- No Name. "Laporan Tertulis Larang Kegiatan PKI Sudah Ditangan Peperti : Paperde Jang melarang, kini sudah ada di Djakarta". *Obor Rakyat*. 2 September 1960.
- No Name. "Liga Demokrasi Terbentuk". *Obor Rakjat*. 3 Mei 1960.
- No Name. "Luaskan Aksi Sefihak : Untuk Mengganyang Setan2 Desa dan Memenangkan Manipol". *Harian Rakjat*. 30 Mei 1964.
- No Name. "Perkara Kasman Singodimedjo : Saksi Memberatkan Terdakwa". *Kedaulatan Rakjat*. 30 Mei 1964.
- No Name. "TANPA STEM-STEMAN, Demokrasi harus di molifisir menurut keadaan". *Obor Rakjat*. 28 Juni 1960.
- No Name. "Untuk mengatasi Amanat Penderitaan Rakjat Perlu Demokrasi : Keterangan Pers Djurubitjara Liga-Demokrasi Sumatera Selatan". *Obor Rakjat*. 1 Juni 1960.
- No Name. "Kaum Kontra-Revolusi Meniup² Pertentangan", *Bintang Timur* 15 Mei 1963.
- No Name. "Pandangan Rasialis Tak Pernah Benar", *Bintang Timur* 15 Mei 1963.
- No Name. "Djadilah Wakil Revolusi Indonesia Jang Bernafaskan Kegamaan Itu!", *Duta Masyarakat*, 2 Juli 1963.
- No Name. "Setiap Perongrongan Thd. Segolongan Ummat Islam Berarti Perongrongan Terhadap Ummat Islam Seluruhnja", *Duta Masyarakat*, 2 Juni 1965.

No Name. "Jang Sedang Kita Galang Adalah Nasakom", *Duta Masyarakat*, 2 Juni 1965.

Sukiman. "Ummat Islam Harus Bersatu untuk Menghadapi Kembalinja ke UUD 1945". *Harian Abadi*. 3 April 1959.

Disertasi, Skripsi, Jurnal .

Cahyani, Agrina Dyah. "Perjuangan Liga Demokrasi Menentang Demokrasi Terpimpin Tahun 1960-1961". *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Indrajat, Himawan. 2016. "Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi". *Jurnal Sosiologi*. FISIP Undip, vol. 18 No.1.

Ishaqro, Alfi Hafidh. 2015. "Dinamika Partai Masyumi Pada Masa Revolusi Fisik 1945-1950". *Jurnal Agasty*. Vol. 5 No. 2.

Lestari, Susi. 2010. "Pengaruh Islam dalam Pemikiran Soekarno Tahun 1915-1935". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Mauriyandaswara, Ryan Daya. 2009. "Kebijakan Soekarno Terhadap Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin". *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nugroho, Setyo Adi. 2020. "Segitiga Kekuasaan Masa Demokrasi Terpimpin", *Jurnal*, UNY.

Rahman, Abdul. "Masyumi Dalam Kontestasi Politik Orde Lama". *Artikel Seminar Nasional LP2M*, Universitas Negeri Makassar.

Rijal Fadli, Muhammad. 2020. "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin : Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang". *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*. Vol. 4 No. 1.

Sanusi, Anwar. 2015. "Pemikiran Transformatif Ir Soekarno dalam Politik Islam". *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sanusi, Anwar. 2018. "Sikap dan Kebijakan Soekarno terhadap Islam Pasca Kemerdekaan". *Jurnal Tamaddun*. Vol. 6 No. 2.

Sanusi, Anwar. "Pemikiran Transformatif Soekarno dalam Politik Islam: Pendekatan Transformatif Bill Gould, Karl Stenbrink, dan Kuntowijoyo", *Jurnal Empower*. Vol. 3 No. 2.

- Sedana Arta, Ketut. 2023. "Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966". *Jurnal Candra Sangkala*. Vol. 4.
- Setyahadi, Mulyer Mananda. 2018. "Analisis Konflik Politik Elite TNI pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)". *Jurnal Renaissance*. Vol. 3 No. 1.
- Sholehuddin, Abi. 2015. "Jargon Politik Demokrasi Terpimpin". *Jurnal Avatara*. Vol. 3 No. 1.
- Soedarmo, Runalan dan Ginanjar. 2014. "Perkembang Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965)". *Jurnal Artefak*. Vol. 2, No. 1.
- Suryanto, Joko. 2009. "Pemberontalan PRRI di Sumatera Barat 1958-1961". *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
- Wardiana, Sjachro, Dian, dan Abie Besman. 2020. "Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era Soekarno (1959-1960)". *Jurnal Representamen*. Vol. 6 No. 20.
- Winata, Lingga, "Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1966", *Jurnal Pendidikan Sejarah AVATARA*, (Vol. 5 No. 3 Oktober 2017), Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
- Zanynu, Muhammad Aswan. 2019. "Soeharto dan Gerakan 30 September (G30S) dalam Narasi Memori Media Daring Indonesia". *Jurnal Komunikasi*. Vol. 4 No. 1.

Web

Tempo. *Edisi Khusus "Sjahrir"*. hlm. 34. <https://www.semaraks.blogspot.com>. diunduh pada 18 Agustus 2023, Pukul 10.20 WIB.

"Menelaah Sejarah Tritura dalam Aksi Mahasiswa", BPCB Kalbar, Kementerian Pendidikan dan Budaya. <http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbsumbang/menelaah-sejarah-tritura-dalam-aksi-mahasiswa>. diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 12.53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

ANRI, Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi.



Lampiran 2

Koran Perdamaian, “Kembali Ke UUD 45 Merupakan Pukulan Telak Bagi Kaum Pemberontak”, 14 Agustus 1959



Lampiran 5

Obor Rakjat, “Liga Demokrasi Tambah Barisan : PSII-Abikusno Masuk djadi Anggota”, 12 Mei 1960.



Lampiran 6

Obor Rakjat, “Bohong Besar – Liga Demokrasi Dikatakan Anti Presiden Soekarno”, 16 Mei 1960.



Lampiran 7

Obor Rakjat, “Liga Demokrasi, suatu Manifesto jang Spontaan! : Sumatera Selatan Bukan Kominis”, 17 Mei 1960.



Lampiran 8

Obor Rakjat, “Untuk mengatasi amanat penderitaan rakjat perlu demokrasi : Keterangan Pers Djurubjtara Liga-Demokrasi”, 1 Juni 1960.



Lampiran 9

Obor Rakjat, “DPR-GR bukan tempat perdojoangan Islam”, 4 Juni 1960.



Lampiran 10

Obor Rakjat, “TANPA STEM-STEMAN : Demokrasi Harus dimolifisir menurut keadaan”, 28 Juni 1960.



Lampiran 11

Obor Rakjat, “Larangan Kegiatan PKI/Organisasi-Organisasinja Masih Berlaku”,
3 Desember 1960.



Lampiran 12

Harian Rakjat, “Luaskan Aksi Sefihak : Untuk Mengganjang Setan² Desa dan
memenangkan Manipol”, 30 Mei 1964.



Lampiran 13

Harian Tempo, "Pendjelasan D.D. Petani Djateng Sekitar persoalan tanah di Klaten". 2 Juni 1964.



Lampiran 14

Kedaulatan Rakjat, "Letjen A. Yani : Tiada Pilihan Lain Ketjuali Melaksanakan Dwikora".



Lampiran 15

Kedaulatan Rakjat, “Perkara Kasman Singodimedjo : Saksi memberatkan Terdakwa”, 30 Mei 1964.



Lampiran 16

Obor Rakjat, “IPKI meminta Supaja : PKI Dikuburkan Sadja”, 2 September 1960.



Lampiran 19

Duta Masyarakat “Djadilah Wakil Revolusi Indonesia Jang Bernafaskan Kegamaan Itu!”, 2 Juli 1963



Lampiran 20

Duta Masyarakat “Setiap Perongrongan Thd. Segolongan Ummat Islam Berarti Perongrongan Terhadap Ummat Islam Seluruhnja” 2 Juni 1965.



Lampiran 21

Duta Masyarakat "Jang Sedang Kita Galang Adalah Nasakom" 2 Juni 1965

Menteri Agama:

Jang sedang kita galang adalah Nasakom

Jang setia melaksanakan asas dan kaidah Negara, Pancasila Manipel-Udeak

Manipel, 2 Juni 1965

Departemen Agama melalui Panitia Galang Nasakom yang diketuai oleh Menteri Agama, telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat Manipel-Udeak pada tanggal 1 Juni 1965. Pertemuan ini membahas tentang pelaksanaan asas dan kaidah Negara, Pancasila Manipel-Udeak yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama.

Menurut Menteri Agama, Galang Nasakom adalah gerakan yang bertujuan untuk menegakkan asas dan kaidah Negara, Pancasila Manipel-Udeak. Gerakan ini harus dilaksanakan dengan penuh kesetiaan dan keteguhan hati.

Menyusul pertemuan tersebut, Departemen Agama telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat Manipel-Udeak. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Menegakkan asas dan kaidah Negara, Pancasila Manipel-Udeak.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Manipel-Udeak.
3. Mengembangkan semangat gotong royong dan kerukunan masyarakat.
4. Menjaga nama baik dan kehormatan masyarakat Manipel-Udeak.

Departemen Agama berharap agar Galang Nasakom dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat bagi masyarakat Manipel-Udeak.

Laporan Penggalan

slam

Berkaitan dengan pelaksanaan Galang Nasakom, Departemen Agama telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat Manipel-Udeak. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Menegakkan asas dan kaidah Negara, Pancasila Manipel-Udeak.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Manipel-Udeak.
3. Mengembangkan semangat gotong royong dan kerukunan masyarakat.
4. Menjaga nama baik dan kehormatan masyarakat Manipel-Udeak.

Departemen Agama berharap agar Galang Nasakom dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat bagi masyarakat Manipel-Udeak.

Manipel, 2 Juni 1965